

**PERAN SERTA DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW)  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) RIAU  
DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



**OLEH**

**MANTARA RUSLI**

**NIM : 10424025106**

**PROGRAM STRATA 1  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **“PERANSERTA DEWAN PENGURUS WILAYAH (DPW) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) RIAU DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana etika politik Partai Keadilan Sejahtera, peranserta Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun etika politik, argumentasi perlunya etika dalam berpolitik dan tinjauan menurut fiqh siyasah terhadap hal tersebut. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partai Keadilan Sejahtera dalam mengartikulasikan etika politik serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap hal tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resech*) dan berlokasi di DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau. Adapun metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan metode penulisan data adalah dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan diskritif analitif. Melalui observasi dan wawancara di lapangan dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera Riau diharapkan dapat memperoleh jawaban-jawaban dan artikulasi Partai Keadilan Sejahtera dalam menerapkan dan membangun etika politik sebagai tuntutan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah diketahui jawaban-jawaban tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqh siyasah dengan menampilkan nash-nash al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan hal tersebut, serta konsep-konsep fiqh siyasah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dengan demikian peranan dan pengaplikasian etika politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dapat membentuk kader-kader Islam dan pribadi muslim yang tangguh dan beradab serta berkualitas.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan etika dan akhlaq Islam sebagai falsafah dan nilai-nilai perjuangan partai. Hal ini dimaksudkan agar nilai spiritual, instrumental dan seremonial serta akhlak dan budi pekerti Islami hadir dalam setiap gerak dan sosialisai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kemudian dapat membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan serta integritas bangsa.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	16
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
E. Kerangka Berpikir .....	17
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PKS DPW RIAU</b> .....	24
A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera DPW Riau .....	24
B. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera .....	27

C. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera .....	30
D. Program Kerja DPW PK-Sejahtera Riau .....	32
E. Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera .....	33
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS ETIKA POLITIK .....</b>	<b>35</b>
A. Konsep Etika Politik dalam Islam .....	35
B. Perkembangan Etika Politik di Tanah Air .....	42
C. Teori Politik Islam .....	50
D. Argumentasi Perlunya Etika Dalam Berpolitik .....	69
<b>BAB IV PERAN SERTA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM</b>	
<b>MEMBANGUN ETIKA POLITIK MENURUT PERSPEKTIF</b>	
<b>FIQH SIYASAH .....</b>	<b>73</b>
A. Etika Politik Partai Keadilan Sejahtera .....	73
B. Peranserta Partai Keadilan Sejahtera Dalam Membangun Etika Politik ....	77
C. Tinjauan Fiqih Siyasah .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan yang paling mencolok di era reformasi adalah permasalahan yang muncul dari sebab akibat perbuatan yang membentuk sistem dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan. Dalam kenyataannya perubahan hanyalah menjadi buah bibir elit politik. Hal ini terjadi karena perilaku elit kurang mengedepankan etika dan budaya politik yang baik. Terbukti mulai dari lahirnya reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini pertikaian-pertikaian di kalangan masyarakat awam hingga kasus-kasus yang muncul pada tataran elit politik-pun selalu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Hal ini menjadi acuan para aktivis Islam untuk ikut serta dalam membangun tatanan yang lebih baik dengan cara ikut dalam percaturan politik melalui prosedur sistem politik di Indonesia. Munculnya partai-partai politik dengan azas Islam -salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera atau yang sebelumnya bernama PK<sup>1</sup>- merupakan wujud dari keikutsertaan aktivis Islam dalam membangun tatanan hidup bernegara yang lebih baik.

Penelitian terhadap partai politik Islam sangat perlu dilakukan, karena partai tersebut mengemban amanah dan risalah Islam di Indonesia yang jumlah

---

<sup>1</sup>PK atau PKS merupakan nama bagi satu partai yang sama, mengingat perolehan partai ini hanya mencapai 1,4 persen, sementara berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, partai yang ikut dalam pemilu tahun 1999 secara otomatis menjadi peserta pemilihan umum tahun 2004 adalah partai yang memiliki batas minimal dua persen, untuk mensiasati undang-undang tersebut PK bermetafora menjadi PKS. (UU. No. 12 Th 2003 Tentang Partai Politik), h. 12.

penduduknya mencapai 87 % (persen) dari 220 juta jiwa adalah kaum muslimin.<sup>2</sup> Menurut Prof. Dr. Abdul Muin Salim, hakikat politik sebagai aktivitas, tidak dapat dipisahkan dari aspek konstitusional yang merupakan hukum dasar (tertulis ataupun tidak tertulis) yang mengatur penyelenggaraan pemerintah sebuah negara. Ia memuat pengorganisasian jabatan-jabatan kenegaraan, lembaga pemerintah dan tujuan yang hendak dicapai. Artinya konstitusi merupakan keabsahan kekuasaan yang memiliki lembaga-lembaga politik sehingga terselenggara fungsi-fungsi dalam sistem politik.<sup>3</sup>

Di dalam periode sistem politik Indonesia semenjak pertengahan tahun 1960-an sampai dewasa ini, stabilitas politik telah dianggap sebagai salah satu dasar berpikir yang empiris bagi penyusun strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia termasuk proses sistem politik itu sendiri. Malahan pemanfaatannya untuk melandasi usaha penataan kembali peta dan kehidupan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, sudah dianggap sebagai pembuktian terhadap teori yang melihat adanya kaitan positif diantara kehidupan politik, ekonomi dan sebaliknya diantara kenyataan ekonomis dan kenyataan politis.<sup>4</sup> Hal ini terjadi karena ketidak mampuan elit politik dan pemerintah dalam merumuskan dan mengaplikasikan aturan-aturan dalam kehidupan sosial sesuai

---

<sup>2</sup>Yusuf Wibisono dkk, *Islam Mulai Akar kedaunnya*, (Bogor: BKIM IPB Press, 2003), Cet. ke-2, Jilid 1, h. 169.

<sup>3</sup>Salim, Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-3, Jilid 1, h. 48.

<sup>4</sup>Lihat : Kata Pengantar oleh Sanit, Arbi dalam bukunya *Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Cet. ke-1, Jilid 1, h. V.

dengan harapan dan cita-cita bangsa yakni cerdas, tertib, adil, makmur dan sejahtera.

Partai politik merupakan institusi kunci bagi sistem politik itu sendiri. Meski media masa dan lembaga-lembaga swadaya atau institusi-institusi ekstra parlementer telah berperan besar dalam proses demokrasi, termasuk di Indonesia, dan dengan sendirinya mengurangi peran partai politik dalam menyuarakan aspirasi rakyat, namun partai politik akan tetap menjadi satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan.<sup>5</sup> Realitas politik di Indonesia saat ini menunjukkan adanya krisis partisipasi politik. Krisis ini terjadi ketika aspirasi rakyat tidak tertampung atau tersalurkan melalui partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat atau media massa. Krisis partisipasi adalah konflik atau bentrokan yang terjadi bila elit pemerintahan (elit partai, DPR dan pemerintah) kurang peduli dengan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan rakyat. Dalam wujud yang ekstrem, krisis partisipasi ditandai dengan mentalitas politisi (elit) yang menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu faktor penyebab dari kenyataan di atas adalah kurangnya penerapan etika dalam berpolitik yang dilaksanakan oleh elit politik itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>5</sup>Muhammad Lukman Edy, *Reformulasi Gerakan PKB, Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Iskandarsyah Institute, 2006), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 1.

Partai politik di Indonesia memiliki kecenderungan yang kurang sehat, yaitu mengarah pada krisis internal, elitisme dan krisis partisipasi. Dengan kecenderungan seperti itu, partai politik kehilangan makna strategisnya dalam proses demokratisasi. Bahkan partai cenderung menjadi kekuatan anti demokrasi. Partai politik dengan sendirinya menjadi kurang populer dikalangan masyarakat. Realitas ini disebabkan oleh tidak adanya “budaya politik” yang baik –misalnya sopan santun dan saling menghargai- dalam menjalankan roda politik dan pemerintahan.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya negara yang dimotori oleh kalangan elit partai merupakan komunitas politik yang memerlukan partisipasi politik warganya untuk menjaga eksistensi negara kesatuan secara berkelanjutan. Dalam negara demokrasi partisipasi warganya sangat diperlukan, semakin tinggi tingkat partisipasi warganya semakin besar peluang negara tersebut untuk menjaga eksistensinya dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Partisipasi politik akan memperoleh kesempatan yang memadai bila sistem politik yang berlaku adalah sistem politik yang demokrasi. Sistem politik memproses dan menghasilkan keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah dan dilaksanakan dalam masyarakat. Untuk menjamin terus bekerjanya suatu sistem politik diperlukan adanya berbagai macam input terutama bagi masyarakat bawah, yang berupa meteri dan saran-saran yang didapat dari berbagai macam referensi tentang perkembangan dunia politik sejak adanya proses politik tersebut hingga saat ini. Input-input ini diubah

---

<sup>6</sup>*Ibid*



oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem politik tersebut yang menjadi output dan selanjutnya output-output menimbulkan pengaruh terhadap sistem politik itu sendiri maupun terhadap lingkungan di mana sistem politik itu berada.<sup>7</sup>

Dengan berakhirnya masa orde baru beberapa tahun yang lalu, sekarang kita berada di era reformasi dengan komitmen yang tinggi untuk membangun system demokrasi yang substansial. Hal ini ditandai antara lain dengan adanya kebebasan berpendapat dan bertindak serta melakukan kontrol terhadap pemerintah. Termasuk ekspresi kebebasan ini adalah pendirian partai-partai politik, yang merupakan sarana utama bagi partisipasi politik rakyat. Dalam pembangunan sebuah system demokrasi komitmen masyarakat politik (*political society*) terhadap system demokrasi sangat menentukan. Masyarakat politik adalah mereka yang aktif dalam partai-partai yang *concerned* terhadap pengendalian atau perolehan kekuasaan pemerintahan serta persaingan untuk mendapatkan dukungan dari rakyat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan publik (*public policy*).<sup>8</sup>

Eksistensi masyarakat politik dengan demikian sangat menentukan dalam proses demokratisasi, yang kini dipahami tidak hanya sekedar *majority rule* beserta lembaga-lembaga formalnya, tetapi mengandung seperangkat nilai-nilai universal. Menurut Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang dikutip oleh

---

<sup>7</sup>Zulfan Heri dan Dahnil Syah, dalam *Lokakarya Pendidikan Guru di Pekanbaru 16-18 Oktober 2000, Pendidikan Politik Kewargaan, Catatan : Partisipasi Politik Warga, oleh Trijoko Waluyo*, (Pekanbaru: ISDP, 2000), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 61-62.

<sup>8</sup>Nitibaskara, Tubagus Ronnyy Rahman dkk, *Menuju Kearifan Bernegara, catatan : "Political Society" dan Demokrasi di Era Reformasi*, (Jakarta: PB PMII, 2005), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 83.

Masykuri Abdillah, nilai-nilai universal ini adalah tidak “*otokratis, otoriter, despotis, dictator, tiran, totaliter, absolute, tradisional, monarkis, oligarkis, plutokratis, dan aristokratis*”<sup>9</sup>. Dengan demikian peran-peran dilakukan dan kebijakan publik yang dihasilkan masyarakat politik semestinya tidak hanya berdasarkan kekuasaan (power) belaka, melainkan juga nilai-nilai universal ini, sehingga proses demokratisasi yang berlangsung dan demokrasi yang akan diwujudkan adalah demokratisasi dan demokrasi yang beradab.<sup>10</sup>

Sejak munculnya masa reformasi, masyarakat politik melakukan peran-peran yang cukup berarti, terutama dalam hal kontrol terhadap pemerintah. Di sisi lain kontrol dalam kondisi transisi dan kritis seperti sekarang ini dinilai berlebihan. Faktor penyebab dari kontrol yang berlebihan ini adalah kekecawaan orang atau kelompok tertentu yang keinginannya “tidak kesampaian” dalam persaingan kekuasaan atau jabatan. Juga bisa jadi hal ini merupakan ekspresi dari tindakan balas dendam kelompok pro orba yang telah kehilangan dominasi kekuasaannya, dan ironisnya mereka tidak menyadari bahwa kondisi sekarang ini merupakan produk dari mereka sendiri pada masa lalu.

Dalam kondisi yang demikian itu banyak dari elit politik berfikir dan bertindak dengan berorientasi lebih kepada kepentingan kelompok masing-masing

---

<sup>9</sup>*Otokratis, otoriter, despotis (zalim), dictator, tiran (penghimpitan), totaliter (keseluruhan), absolute (mutlak), tradisional, monarkis (kerajaan), oligarkis (segelintir orang dalam pemerintahan), plutokratis, dan aristokratis* merupakan istilah dalam sistem bernegara dan merupakan penanggalan yang bersifat universal, namun tidak diinginkan lagi oleh Negara Demokrasi yang berbentuk Republik dengan system Presidential dan Parleментар pasca Perang Dunia ke II (setelah terbentuknya PBB) hingga sekanrang ini. Oleh : Budiman Susanto, *Transnasional*, (Majalah Gema, 2007), Edisi III, h. 17.

<sup>10</sup>Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman dkk, *ibid*, h. 84.

dan berusaha melemahkan atau menjatuhkan kelompok lainnya, tanpa menghiraukan nilai-nilai etika dan moral politik. Maka banyak kontrol (kritik) itu diekspresikan bukan dalam rangka memperbaiki keadaan tapi justru memberikan ancaman-ancaman. Penyebab dari kondisi seperti ini adalah adanya kebijakan pemerintah yang dianggap belum sesuai dengan harapan rakyat.<sup>11</sup>

Mungkin harus diakui bahwa proses demokratisasi di Negara kita masih seumur jagung yang menuntut banyak pihak untuk mewujudkannya. Sepertinya kita tidak bisa hanya melihat proses transisi menuju demokrasi ini berjalan secara alamiah, tetapi diperlukan peran aktif guna memagarinya agar tidak berkembang menjadi liar, chaos, atau anarkis. Karena gambaran umum wajah demokrasi dan system politik kita dewasa ini semakin membuat kita khawatir dan takut.

Demokrasi seolah-olah telah diterjemahkan sebagai konflik yang emosional dan bernuansa kekerasan, yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh atau isu-isu dari golongan politik tertentu yang tidak bertanggung jawab. Indikasi itu antara lain ; pemilihan kepala daerah langsung yang belakangan ini banyak terjadi konflik di berbagai daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat Provinsi, sehingga mengundang intervensi pemerintah pusat. Aplikasi undang-undang Otonomi Daerah yang kemudian menjadi ricuh antara pendukung calon dan mengarah kepada tindak kekerasan politik, politik uang (*money politic*), anarkis, adu unjuk rasa antar kelompok yang kemudian berkembang menjadi bentrok fisik dan tidak jarang memakan korban jiwa. Sehingga reformasi

---

<sup>11</sup>Muhammad Lukman Edy, *op. cit*, h. 85.

dikhawatirkan berkembang menjadi hantu yang menakutkan, karena yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kerusuhan pembakaran, amuk massa, ancaman bom, konflik kekerasan antar suku, agama, seperti kasus Selat Panjang, Pangkalan Kerinci dan Batam.<sup>12</sup>

Ada kecenderungan reformasi telah dibelokkan menjadi mengabaikan nilai moral, norma agama, etika, kebebasan menjadi kebisaan dan demokrasi menjadi anarki. Kekuasaan tidak diaplikasikan kedalam konteks membangun kesejahteraan rakyat. Sebagian persoalannya adalah disebabkan oleh karena penegakan hukum masih berputar dalam bentuk wacana dan retorika serta etika politik yang bermoral dan humanis belum tumbuh atau barangkali cenderung dikesampingkan. Hal ini dikarenakan minim-nya “pendidikan politik dan hukum” terhadap para pelaku politik dan hukum itu sendiri.

Di sisi lain, etika partai dan anggota legislative telah mempertontonkan perilaku politik yang naïf dan penuh paradox yang disebabkan oleh ambisi kekuasaan dan keserakahan pada masing-masing individu maupun kelompok elit politik. Retorika mereka selalu kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama, namun dalam kenyataannya mereka berpolitik tanpa etika. Elit politik berkeinginan keluar negeri dengan dalih untuk sosialisasi sidang tahunan MPR, sementara kondisi keuangan Negara masih minus. Meskipun demikian bukankah sosialisasi itu justru lebih urgen disosialisasikan kepada aparat birokrasi level menengah, pengurus partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, perguruan

---

<sup>12</sup>Zulfan Heri dan Dahnil Syah, *op cit*, h. 77.

tinggi, dan kelompok-kelompok sosial independent lainnya. Karena merekalah yang dipandang penting mendapat edukasi dan pencerahan politik, agar nantinya dapat mendiskusikan dan mensosialisasikannya dengan masyarakatnya sampai pada level bawah. Disamping itu, pada level daerah, elit politik (baca:DPRD) menuntut fasilitas kendaraan dinas dan rumah dinas secara berlebihan.

Dalam system politik etika menjadi konflikstas permasalahan dalam proses demokrasi, selanjutnya solusi apa yang dapat ditawarkan agar system politik itu berjalan di atas koridor yang *committed* terhadap dimensi peningkatan martabat kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dengan basis system nilai moral dan etika politik yang mengutamakan keadaban. Untuk itu perlu dibangun kembali penguatan dan sosialisasi nilai-nilai moral, etika, norma dan kepatutan yang dimulai dari dalam lingkungan DPR dan pemerintah. Sosialisasi tersebut dapat berupa batasan perilaku politik serta sangsi terhadap pelanggarannya.

Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah kinerja pemerintah yang semakin mengkhawatirkan dengan berbagai pelanggaran hukum baru. KKN dimasa Soeharto yang menular hingga sekarang ini menjadi alasan dan bukti ketidakstabilan moral dan etika para elit. Seperti dikatakan oleh Prof. Dr. Nitibaskara, kendati perkara KKN yang telah dilakukan sejak zaman orde baru hingga sekarang ini berbeda-beda, KKN dalam tataran petinggi Negara memiliki kesamaan prinsipil yakni tindak pidana korupsi tersebut berkaitan erat dengan

jabatan (*occupation*), yang di dalamnya mengandung sejumlah kekuasaan (*power*), maka tindakan KKN dapat dikelompokkan sebagai *Occupational Crim* (kejahatan okupasi) yakni tindakan KKN yang terlaksana mensyaratkan adanya suatu jabatan atau pekerjaan jenis tertentu yang dilindungi undang-undang.<sup>13</sup> Jadi kekuasaan selalu menjadi kekuatan para elit politik yang melanggar konstitusi sebagai tameng. Namun kendati demikian etika dan moral politik para politikus di Indonesia yang seharusnya diteliti lebih cermat, apakah mereka (baca ; politikus brutal) selalu memiliki pegangan hidup yang baik atau selalu menggunakan prinsip *Occupation as long as* (selagi menjabat).

Fenomena yang berkembang di masyarakat elit politik mengindikasikan bahwa telah terjadi demoralisasi politik akut yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan pendidikan agama.<sup>14</sup> Menurut para praktisi politik, terutama aktivis-aktivis di Indonesia (baca ; PMII, HMI, KAMMI dan lain-lain) akan menjadi sebuah gagasan baru, ingin di apakan bangsa ini. Apakah akan tetap bergelimang para politikus yang selalu mengabaikan konstitusi bahkan mengorbankan etika demi sebuah kekuasaan. Solusi konkrit bagi mereka adalah *revolusi sistemik*<sup>15</sup> yang dianggap mampu dituangkan bagi Negara yang mulai belajar berdemokrasi namun seperti sudah melampaui (*the high of*

---

<sup>13</sup>Nitibaskara, ed. *Kejahatan Dalam Analisa Kriminologi*, Tim Editor : PB PMII dan Forum Mahasiswa Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 1.

<sup>14</sup>Zulfan Heri dan Dahnil Syah, *op. cit*, h. 80.

<sup>15</sup>Revolusi sistemik adalah revolusi cara pandang menuju perubahan kultur, perubahan struktur (pemerintahan) dan perubahan konstitusi (hukum yang digunakan). Oleh : Sutarto Sudibyo, *Solusi Negeri*, (Bandung: Majalah Garda, 2006), Edisi V, h. 30.

*democraton*)<sup>16</sup>. Yang dimaksud revolusi di sini adalah revolusi kultural, revolusi struktural, dan revolusi konstitusi. Untuk lebih jelasnya (baca; Majalah Tradem hal 60).<sup>17</sup>

Di Negara *multicultural* seperti di Indonesia ini, banyak sekali para pemikir bangsa yang cenderung ingin membangun pemikiran melalui doktrin yang tujuannya adalah membenahi etika politik sehingga dapat dirumuskan bahwa bangsa Indonesia memerlukan pedoman yang benar dalam berpolitik. Seperti yang tercatat dalam Mukhtammar NU (salah satu organisasi Islam di Indonesia) di Situbondo pada tahun 1984 dan Mukhtammar Cipasung 1994 dikatakan bahwa telah tertuang dalam kitab-kitab klasik hukum agama (*al-Kutub al-Fiqhiyyah*) dan ditemukan wawasan yang meliputi lima jaminan dasar kehidupan atau yang lebih dikenal dalam fikih sebagai *al-Kulliyath al-Khamsah*, dengan pemaknaannya sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. *Hifz al-din* yaitu jaminan terhadap keyakinan keagamaan termasuk kebebasan beragama dan peniadaan paksaan dalam beragama.
2. *Hifz al-nafs* yaitu perlindungan jiwa, perlindungan dari penindasan fisik dan di luar batas-batas hukum.
3. *Hifz al-aql* yaitu jaminan terhadap pikiran dan kebebasan berpendapat

---

<sup>16</sup>*The High of Democraton* merupakan sebutan bagi demokrasi yang sudah lama hidup dan berkembang pada sebuah Negara yang maju seperti di Amerika. Oleh : M. Rodli Khaelani, *Serangan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Majalah Tradem, 2002), Edisi III, h. 28.

<sup>17</sup>Moehammad Thobroni, *Transformasi Demokratik, Catatan Islam Progresif Transformatif*, (Yogyakarta: PMII, 2005), Cet. ke-1, Jilid 7, h. 59.

<sup>18</sup>Misbahush Sudur, *NU dan Civil Society di Indonesia*, (Pekanbaru: LPNU, 2005), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 71.

4. *Hifz al-nasl* yaitu jaminan reproduksi keturunan dan berkeluarga

5. dan *Hifz al-amwal* yaitu perlindungan atas harta benda dan hak milik pribadi

Pemikiran yang tertuang dalam catatan tersebut di atas dimaksudkan untuk diterapkan kedalam pola fikir manusia, yang kemudian menjadi tolak ukur berpijak di dalam pengambilan kebijakan berpolitik guna membenahi system politik sekaligus untuk memperbaiki moral para politikus negeri.

Di masa reformasi yang cenderung kurang berhasil, sudah barang tentu banyak lagi format politik yang harus diselesaikan terutama masalah etika. Kekurangberhasilan reformasi ini karena munculnya perilaku politik yang pada masa ordebaru cenderung tertekan dan tidak mampu menampilkan varian gerakannya. Di satu sisi munculnya gerakan politik reformasi tidak diiringi dengan nilai-nilai moral dan budaya yang baik, sehingga ambisi-ambisi kekuasaan-pun menjadi perilaku nyata yang dapat kita rasakan. Di sisi lain Islam politik yang bercorak *formalistic* menunjukkan kekuatannya sebagai daya tekan untuk memasukkan format-format politik yang dipersepsikan sejalan dengan aspirasi politik umat Islam dalam wilayah kenegaraan. Begitu pula simpati sebagai masyarakat, meskipun masih sangat jauh dari jumlah mayoritas, memperlihatkan gerakan-gerakan mendapat dukungan Islam tertentu. Betapapun langgam politik yang ditampilkan PKS, meskipun tidak secara ketat, mempresentasikan salah satu varian gerakan Islam politik era reformasi. Beberapa agenda politik Partai Keadilan sejahtera (PKS) yang menaruh perhatian terhadap orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang disebut



Syafi'i Anwar sebagai *Imagined Community*,<sup>19</sup> yakni terwujudnya suatu system politik Islam, kemasyarakatan, budaya Islam sehingga mencerminkan moral dan etika Islam, serta eksprementasi system kenegaraan Islam menjadi modus gerakan Islam politik ini.

Penjelasan mengenai peran serta Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun etika politik akan dibahas pada bab berikutnya. Di sini penulis sedikit memaparkan tentang Partai Keadilan Sejahtera berperan serta dalam membangun etika politik di dalam internal partai, yang dapat kita temui pada pembinaan kader. Di dalam pembinaan kader, Partai Keadilan Sejahtera memberikan doktrin yang kuat terhadap calon anggota mengenai pentingnya hidup bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam, yang mana Islam sebagai *fundamental* dijadikan ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, pembebasan manusia dari kefakiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam.<sup>20</sup> Salah satu contoh dari pembinaan kader, yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera adalah pentingnya memilih ketua yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan merujuk kepada nilai-nilai Islam dan kuat dalam membela kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan

---

<sup>19</sup>Subkhinul Ja'far, S.HI, *Penerapan Asas Islam dalam Partai Politik di Era Reformasi Menurut Perspektif Fiqih Siyasa*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2006), Skripsi, h. 9.

<sup>20</sup>Bush Hamidi, (Pembinaan Kader), *wawancara*, Pekanbaru, 15 November 2008.

persatuan bangsa, jauh dari *fanatisme* kepentingan pribadi dan golongan, serta memiliki wawasan politik, hukum dan Syari'at dalam mengemban tugasnya.<sup>21</sup>

Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki panduan liqa' bagi para anggota pemula, berbentuk buku dengan tema kurikulum tarbiyah yang berisi tentang kisi-kisi atau garis-garis besar program tarbiyah Islamiyah sebagai panduan untuk membentuk pribadi muslim yang shalih dan shalihah. Bacaan ini menggali berbagai macam cabang ilmu pengetahuan keislaman yang berfungsi sebagai pemicu bagi para kader dalam membentuk insan yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan visi dan misi tarbiyah Partai Keadilan Sejahtera, yakni menjadikan seorang da'i yang produktif dan mampu menanggung beban dakwah, seorang da'i yang memiliki wawasan ilmiah dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.

Adapun program tarbiyah PK Sejahtera yang tertuang dalam buku panduan pembinaan kader adalah mengenai al-Qur'an dan Ulumul Qur'an, Hadits dan Ulumul Hadits, Fiqih, Metode Berfikir dan Riset, Manajemen, Belajar mandiri, Rumah Tangga Islam, Bahasa Arab, Kesehatan dan Kekuatan fisik, Kependidikan dan guru, Sistem Politik dan hubungan Internasional, Seni dan Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan, Aqidah Islam, Akhlaq, Sosial Politik dan Kontemporer, Tata Sosial Kemasyarakatan, Perundang-undangan dan lain-

---

<sup>21</sup>DPP PK-Sejahtera, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PK-Sejahtera*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Tuna, 2003), Cet. ke-1, Jilid 2, h. 17.

lain. Salah satu pembahasan dari kurikulum tarbiyah Parai Keadilan Sejahtera yang cenderung sangat berkaitan dengan etika politik adalah Aqidah Islam dan Akhlaq. Karena di dalamnya banyak sekali materi yang membahas tentang varian gerakan Islam termasuk didalamnya tentang pemahaman pengendalian diri dalam kehidupan berkebangsaan, baik ditinjau dari segi Aqidah itu sendiri, ibadah, Akhlak, ekonomi, sosial politik, dan Negara.<sup>22</sup>

Selanjutnya, bangkitnya gerakan Islam politik yang memiliki karakter *formalistic* sebagaimana dipresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidaklah berlangsung monolitik.<sup>23</sup> Artinya Partai Keadilan Sejahtera pada dasarnya ingin mencurahkan segala persepsi tentang keindahan dalam berpolitik, dengan kata lain politik akan terlihat indah dan menyejukkan apabila di implementasikan dengan etika dan moral politik itu sendiri. Seperti banyak contoh yang telah terjadi di Indonesia, antara lain kasus-kasus korupsi, pelecehan sosial, kasus suap, diskriminasi dan lain sebagainya dalam tataran elit politik menunjukkan tidak adanya etika dan moral politik. Hal ini merupakan fenomena menarik untuk diamati, dan dilakukan penelitian terhadap partai politik Islam khususnya Partai Keadilan Sejahtera dalam meletakkan sendi-sendi moral pada elit politik dan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul, yang Insya

---

<sup>22</sup>DPD Partai Keadilan Sejahtera Surakarta, *Kurikulum Tarbiyah*, (Surakarta: Auliya Press Solo, 2004), Cet. ke-2, Jilid 1, h. 29.

<sup>23</sup>Subkhinul Ja'far, *op. cit* h. 10.

Allah dijadikan fokus penelitian dengan judul **Peranserta Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau Dalam Membangun Etika Politik Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini pada Peranserta DPW Partai Keadilan sejahtera Riau dalam membangun etika politik.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Etika Politik Partai Keadilan Sejahtera ?
2. Bagaimana Peranserta Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun Etika Politik ?
3. dan Bagaimana Tinjauan menurut Fiqh Siyasah ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Etika Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

- b. Untuk mengetahui bagaimana Peranserta Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun etika politik
- c. Untuk mengetahui Tinjauan menurut fiqh Siyasa

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangsih terhadap terwujudnya system politik dan pemerintahan yang baik di Indonesia.
- b. Untuk menambah wacana dan wawasan penulis dalam bidang kejuruan serta berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk menjawab dari permasalahan yang ada di DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Riau
- d. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

## E. Kerangka Berpikir

Jika sebuah wujud dari politik itu dibedah, maka ia akan memperlihatkan irisan-irisan dalam yang membentuknya demikian. Jika benda politik adalah sesuatu yang tampak kasat mata, maka di balik irisan terluar ditemukan *perilaku politik*. Perilaku politik tampak dalam sejumlah sistem atau pola yang teratur yang

bekerja di masyarakat, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan lain sebagainya. Dan apa yang dikenal sebagai perilaku itupun, dibaliknya terdapat apa yang disebut etika. Ia adalah sejumlah kerangka berpikir yang mendasari perilaku manusia. Bagi masyarakat muslim sumber etka itu berupa ajaran yang terangkum dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>24</sup>

Peranserta membangun etika politik menjadi pembahasan utama penelitian ini. Ada sumber nilai yang menjadi hal substansial ketika berbicara mengenai sebuah sistem di masyarakat. Ada pengabsah, ada *legitimate* yang mendasari. Sumber nilai itu bisa diturunkan ke dalam sebuah paradigma berpikir yang adekuat yang dikenal sebagai tata nilai atau doktrin.

Demikian pula dalam kerangka pemikiran ini. Ada doktrin yang dipandang menjadi konfirmasi legitimasi bagi setiap pandangan, orientasi dan perilaku PK-Sejahtera. Ia bersifat ajeg tetapi mengejawantah dalam sejumlah perilaku yang tidak bisa tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi tuntutan ini terlembaga secara permanen dalam struktur. Bagaimanapun, sebagai partai politik Islam –PKS dalam hal ini- Ia terlibat, melibatkan diri dan dilibatkan dalam serangkaian proses yang membuatnya harus terus melahirkan respons-respons zaman. Waktu adalah manifestasi historis yang melahirkan sekian aksi dan reaksi, dimensi subjektif dan dimensi objektif, *challenge* dan *response*, atau tantangan dan jawaban.

---

<sup>24</sup>M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Study Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 326.

Dalam studi politik Islam, etika politik merupakan suatu rangkaian yang tidak mungkin dipisahkan dari alur politik itu sendiri. Dengan demikian, peranserta PK-Sejahtera dalam membangun etika politik menjadi satu kesatuan sistem dalam sejarah PK-Sejahtera yang akan terus menerus menjadi target utama dalam membangun sistem politik di Indonesia.<sup>25</sup>

Peranserta dalam membangun etika politik secara sederhana bisa didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam membangun etika politik, dengan jalan menerapkan perilaku santun dan saling hormat menghormati terhadap segala tindakan atau perilaku yang mungkin muncul baik di internal partai, terhadap partai lain dan terhadap masyarakat umum hingga kenegaraan.<sup>26</sup>

Dengan demikian, peranserta membangun etika politik dapat disistemasi pada beberapa poin kajian. Pertama, Bagaimana etika politik PK-Sejahtera dan peranserta-nya dalam membangun etika politik. Kedua, bagaimana tinjauan menurut fiqh siyasah. Karena subjek penelitian ini adalah sebuah partai politik yaitu PK-Sejahtera, maka pelaku peranserta secara umum adalah organisasi PK-Sejahtera. Secara detail ia bisa dipecah ke dalam beberapa agregat status : kader, pimpinan dan pengurus.

Peranserta membangun etika politik secara langsung menggambarkan adanya upaya aktif bagi pembangunan institusi dan masyarakat demokrasi.

---

<sup>25</sup>DPD Partai Keadilan Sejahtera Surakarta, *op. cit*, h. 51.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 57.

Demokratisasi yang selaras dengan nilai-nilai etika menjadi tuntutan bagi negara manapun. Ia pada gilirannya bermuara pada pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat (*civil society*).

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik (*field resech*) yang dilaksanakan pada DPW Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

### 2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah para pengurus inti Partai Keadilan Sejahtera dan tokoh masyarakat.
- b. Obyek penelitian ini adalah Peran Serta Partai Keadilan Sejahtera dalam Membangun etika Politik.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjumlah 25 orang. Dan adapun sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu sebanyak 11 orang yang terdiri dari pengurus inti dan ditambah dengan beberapa kader PK-Sejahtera.

### 4. Sumber Data

Adapun data dalam penulisan ini adalah :



- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari para pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengetahui permasalahan yang diteliti.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari informan yakni tokoh masyarakat, pimpinan partai lainnya dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### 5. Methode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap para pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan para tokoh masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan yang diteliti.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses inventarisasi dokumen-dokumen Partai Keadilan Sejahtera yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Adapun data yang terkumpul, dianalisa melalui metode analisa data kualitatif, yaitu jenis analisa dengan cara mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, yang

kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

#### 7. Methode Penulisan

Setelah seluruh data yang terkumpul dianalisis, penulis mendiskripsikan data sebagai berikut :

- a. Methode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah atau pendapat yang bersifat umum, kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Methode Induktif, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa, dan kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Methode Deskriptif Analitif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, kemudian dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini secara garis besar terdiri dari beberapa bab antara lain yaitu :

- Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab II : Gambaran umum profil Partai Keadilan Sejahtera, Sejarah, Ideologi Partai Keadilan Sejahtera, Visi dan Misi, Program Kerja, dan Struktur Partai Keadilan Sejahtera
- Bab III : Konsep Etika Politik dalam Islam, Perkembangan Etika Politik di Tanah Air, Teori Politik Islam dan argumentasi perlunya etika dalam berpolitik.
- Bab IV : Etika Politik Partai Keadilan Sejahtera, Peran Serta Partai Keadilan Sejahtera membangun etika politik menurut fiqh siyasah yang terdiri dari, bagaimana etika politik yang dibangun oleh Partai Keadilan Sejahtera dan penerapannya sebagai pedoman berpolitik, serta tinjauan fiqh siyasah.
- Bab V : Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI RIAU**

**A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera DPW Riau**

DPW Partai Keadilan Sejahtera Riau didirikan pada tanggal 4 Mei 1998 seiring dengan runtuhnya rezim orde baru dan lahirnya era reformasi. Awal mulanya PK. Sejahtera bernama Partai Keadilan, seiring waktu berjalan pada tanggal 03 Juli 2003 Partai Keadilan bermetamorfosa menjadi PK. Sejahtera.<sup>13</sup> Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera Riau dipelopori oleh Bapak Triano, S.SI dan didukung oleh kelompok anak bangsa dan para simpatisannya yang sama-sama memiliki cita-cita luhur, yakni menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945.<sup>14</sup>

Partai Keadilan Sejahtera Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Riau memiliki pusat kantor yang bertempat di Jl. Harapan Raya, Gang Bengkulu Pekanbaru. Sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera merupakan penerus perjuangan Partai Keadilan, yang selanjutnya bermetamorfosa menjadi PK. Sejahtera karena memiliki persamaan tujuan dan cita-cita.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Hidayat Nur Wahid dan Almuzmil Yusuf, *Pernyataan Kesepakatan di Hadapan Notaris Dalam Penggabungan Sebuah Partai Dengan Nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, (Jakarta: Akta Notaris PK dan PKS 03 Juli 2003).

<sup>14</sup>Dokumen DPW PK-Sejahtera Riau 2003.

<sup>15</sup>*Ibid*

Dalam menjalankan roda organisasinya, PK. Sejahtera dibingkai oleh peraturan-peraturan yang mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh Dewan Pengurus Pusat (*Central Board*) yang pengelolaannya direncanakan sedemikian rupa oleh team pusat yang dipilih melalui seleksi dan musyawarah tertutup. Selain itu, struktur kepengurusan di wilayah *regional* disebut dengan Dewan Pengurus Wilayah (*regional board*) dan Dewan Pimpinan Daerah (*District Board*) yang mengelola wilayah setingkat provinsi dan kota/kabupaten.

PK. Sejahtera merupakan partai politik yang berorganisasi secara baik dan rapi, hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kader-kadernya. Dan PK. Sejahtera merupakan partai yang berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah yang menjadikan Islam sebagai asas kehidupan keseharian, baik sebagai pribadi maupun organisasi. PK. Sejahtera merupakan partai dakwah yang senantiasa melakukan dengan padanya pemilu, dengan kursi legislative maupun tanpa kursi legislative. PK. Sejahtera juga merupakan partai kader yang senantiasa melakukan proses pengkaderan terhadap setiap anggotanya tanpa terkecuali.<sup>16</sup>

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik yang didirikan oleh sejumlah aktivis muslim di tengah iklim demokrasi terbuka yang diawali oleh terjadinya reformasi di Indonesia. Bisa jadi, kemunculan Partai

---

<sup>16</sup>Sahar Hassan dkk, *Memilih Partai Islam Antara Visi, Misi dan Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 31.

Keadilan Sejahtera (PKS),-seperti halnya partai lain- mengundang sejumlah tanda tanya. Oleh karena itu, penjelasan gamblang yang menggambarkan sisi partai amat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam memahami dan sekaligus membuka ruang-ruang keakraban yang mengakibatkan *Ukhuwwah Islamiyah* terjalin baik.

Meski peran histories kaum muslimin dalam perjuangan Indonesia begitu besar dan menentukan, namun tak dapat diingkari adanya kenyataan bahwa Islam sering dikesankan sebuah momok yang kerap membangkitkan kecurigaan para penguasa di Indonesia. Menurut penulis kesan ini terjadi karena ketakutan-ketakutan penguasa terhadap penerapan syari'at Islam yang dianggap tidak mewakili kepentingan seluruh umat beragama di Indonesia serta merupakan bentuk diskriminasi politik dan hukum bagi non muslim. Di awal kemerdekaan, Presiden pertama Republik Indonesia yakni Ir. Soekarno, dalam pidato-pidatonya telah membuka peluang demokrasi bagi perjuangan Islam Indonesia. Namun pada tahun 1959, ia telah menutup kembali peluang itu dengan dekritnya yang disusul dengan diterapkannya demokrasi terpimpin yang pada hakektnya sebuah bentuk diktatorisme,<sup>17</sup> yang menurut penulis merupakan bentuk apresiasi terhadap ketakutan-ketakutan seperti yang telah diuraikan di atas.

Perlawanan kaum muslimin terhadap pemberontakan dan makar Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 membuktikan kebenaran dan

---

<sup>17</sup>Nur Mahmudi Ismail, ed. *Jati Diri Keadilan*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 29-30.

kekokohan sikap umat Islam pada masa orde lama. Komunisme yang telah berkali-kali mengobarkan pemberontakan di Indonesia terbukti tetap bertahan pada garisnya yakni, atheisme, anarkisme dan radikalisme. Anehnya pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto justru mengembangkan sikap apriori terhadap umat Islam, sebuah langkah yang sangat bertolak belakang dengan tuntutan realita. Menurut hemat saya, sikap apriori pemerintah orde baru terhadap umat Islam pada masa itu adalah merupakan bentuk ketidak sanggupannya rezim terhadap kemungkinan munculnya kembali kelompok yang menginginkan penerapan syari'at Islam. Di sisi lain adanya "keepakatan" menjadikan pancasila sebagai asas tunggal oleh rezim orde baru merupakan bentuk antisipasi terhadap pecahnya ideologi bangsa.<sup>18</sup>

Atas dasar kenyataan-kenyataan yang melatarbelakangi sejarah berdirinya PK. Sejahtera itu, dipandang wajar jika para fungsionaris partai ini adalah mereka yang tergolong muda. Sebab, mereka mewakili sebuah generasi baru yang sebagian besar lahir, hidup dan berjuang di tengah-tengah kemapanan dan ketentraman orde baru.<sup>19</sup>

## **B. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera**

Ideologi Sebagai istilah mulai diperkenalkan selama Revolusi Perancis oleh Antoine Destutt de Tracy dan pertama kali digunakan ke public pada tahun

---

<sup>18</sup>Rusli Mantara, *Reformulasi Gerakan Mahasiswa, Catatan : Pandangan Terhadap Ideologi Bangsa*, (Pekanbaru: ResumeLKD BEM Psikologi UIN Suska Riau, 2008), h. 5.

<sup>19</sup>Dokumen DPW PK-Sejahtera Riau 2003.

1796. Bagi Tracy, ideology dimaksudkan dengan “ilmu tentang ide” yang diharapkan dapat mengungkap asal muasal dari ide-ide dan menjadi cabang ilmu baru yang kelak setara dengan biologi atau zoologi. Makna ideology berubah di tangan Karl Mark melalui kerja awalnya dalam buku *The German Ideology* yang ditulis bersama dengan F. Engels.<sup>20</sup>

Ideology lebih diartikan sebagai system berfikir universal manusia untuk menjelaskan kondisi mereka. Berkaitan dengan proses dinamika sejarah, dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik.<sup>21</sup> Berakar pada kaum liberalis, ideology diartikan sebagai system kepercayaan individu tentang dunia yang lebih baik, sehingga tampak sebagai pola fikir (*mindset*) bagi penganutnya. Namun berdasarkan kecenderungan masyarakat masa kini, ideology dipandang sebagai kumpulan ide atau konsep mengenai cara hidup (*way of life*) yang diwarnai oleh budaya dan tatanan masyarakat serta kehidupan politik.

Beranjak dari pemikiran di atas, ideology adalah system kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam jagad sosial politik. PK-Sejahtera sebagai entitas politik, secara subjektif berjuang dengan dasar aqidah, asas dan moral Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Secara eksternal, Islam dijadikan bentuk *diferensiasi* dan sekaligus *positioning* PK-Sejahtera sebagai entitas politik nasional yang berhadapan dengan

---

<sup>20</sup>MPP PK-Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: MPP PK-Sejahtera, 2008), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 29.

<sup>21</sup>PB PMII, *Perspektif Ideologi*, [www.ideology.com](http://www.ideology.com), September 2008, h. 2



entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, PK-Sejahtera berkeyakinan dan menegaskan bahwa secara internal-subjektif aktifitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dan dengan akhlak terpuji, aktivitas ini menjadi bagian yang bernilai “amal shalih”.<sup>22</sup>

Itulah dasar PK-Sejahtera, secara internal-subjektif menghimpun kader-kadernya dalam barisan yang rapi untuk memperjuangkan aspirasi umat dan mencapai tujuan nasional. Atas dasar itu pula, PK-Sejahtera membangun etika politik khususnya bagi para kader dan bahkan militansi memperjuangkan para kader, termasuk semangat rela berkorban. Dengan keyakinan, bahwa aktivitas politik bukan hanya sekedar kegiatan profan-duniawi, tetapi sarat dengan dimensi sakral-religius ukhrowi yang bernilai ibadah.<sup>23</sup> Aktivitas politik dapat menjadi ruang ekspresi dan menguak potensi diri, dan juga sebagai tempat bagi kader untuk berkhidmat kepada publik sebagai bagian dari bentuk pengkhidmatan mereka terhadap agama yang sarat dengan aspek spiritual dan kemanusiaan. Bagi PK-Sejahtera, darah pergerakan itu menjadi mungkin dengan menempatkan Islam secara internal-subjektif sebagai aqidah, asas (ideology) dan moralitas perjuangan. Substansi moralitas perjuangan PK-Sejahtera sendiri adalah bersih, peduli dan professional.

---

<sup>22</sup>Amin Triawan Ketua Umum DPW PK-Sejahtera Riau, *wawancara*, Pekanbaru 21 Juli 2009.

<sup>23</sup>Chandra, Staf Sekretariat DPW PK-Sejahtera Riau, *wawancara*, Pekanbaru 21 Juli 2009.

### C. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Sebelum dijabarkan secara singkat mengenai sasaran, ada baiknya terlebih dahulu dijabarkan secara singkat pula mengenai visi dan misi PK-Sejahtera. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) visi dari PK-Sejahtera, yakni meliputi visi umum dan visi khusus. Visi umum dari PK-Sejahtera adalah “sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”. Sedangkan visi secara khusus dari PK-Sejahtera adalah “Partai berpengaruh, baik secara kekuatan politik, partisipasi maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”. Masyarakat madani dalam pengertian PK-Sejahtera adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada ; nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka, gotong royong, demokratis dan menjaga kedaulatan negara. Masyarakat madani dalam pengertian PK-Sejahtera dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam *ukhuwah Islamiyah* (ikatan keislaman), *ukhuwah wathaniyah* (ikatan kebangsaan) *ukhuwah basyariyah* (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI.<sup>24</sup> Adapun visi dan misi yang tertuang di dalam Platform Kebijakan Pembangunan dan Falsafah Dasar Perjuangan PK-Sejahtera adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

Adapun visi dari Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut :

---

<sup>24</sup>MPP PK-Sejahtera, *op. cit*, h. v.

- a. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam dan politik dengan doktrin organisasi ; *Al hizbu huwal jama'ah wal jama'ah hiyal hizb.*
- b. Kekuatan transformative dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
- c. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang memiliki cita-cita yang sama dalam menegakkan nilai dan system Islam.
- d. Akselerator bagi perwujudan madani di Indonesia.<sup>25</sup>

## 2. Misi

Adapun misi Partai Keadilan Sejahtera yaitu sebagai berikut :

- a. Menyebarkan luaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kader *anashir taghyir*
- b. Mengembangkan opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam.
- c. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- d. Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan continue dalam bingkai hukum dan etika Islam.
- e. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk mewujudkan *ukhuwwah Islamiyah dan wihdatul ummah.* Dan dengan berbagai

---

<sup>25</sup>Dokumen DPW PK-Sejahtera Riau 2004.

komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasi agenda reformasi.

- f. Ikut serta memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezholiman khususnya terhadap negeri-negeri yang tertindas.<sup>26</sup>

#### **D. Program Kerja DPW PK-Sejahtera**

Dalam sebuah organisasi rancangan pelaksanaan program kerja perlu dilakukan guna efektifitas kinerja dalam suatu organisasi tersebut. Adapun rancangan program kerja DPW PK-Sejahtera Riau adalah :

- a. *Mabit*, merupakan do'a dengan melaksanakan shalat tahajut bersama. Mabit yang dilaksanakan oleh para anggota dan kader-kader PK-Sejahtera merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berjamaah.
- b. *Pelatihan Legislatif*, adalah suatu kegiatan yang berupa seminar tentang fungsi dan peranan anggota legislatif, yang diberikan kepada para kader atau anggota PK-Sejahtera.
- c. *Jaulah*, adalah suatu kegiatan yang dilakukan DPW PK-Sejahtera dalam mengunjungi sekaligus memantau para kader di berbagai cabang. Kegiatan ini merupakan wujud dari silaturahmi yang berfungsi sebagai wadah pembentuk soliditas kader.
- d. *Mukhayyam*, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan fisik dan jasmani seperti senam dan perlombaan-perlombaan.

---

<sup>26</sup>Dokumen PK-Sejahtera *Training Orientasi Partai (TOP)*, Jakarta 04 Agustus 2002.

- e. *Rukyah*, adalah suatu kegiatan terapi pembersihan diri dari segala macam bentuk syirik kepada Allah. Bagi kader atau simpatisan yang pernah melakukan perilaku mistis (berkaitan dengan makhluk halus seperti jin), *rukyah* merupakan bentuk kegiatan pembersihan dari hal mistis tersebut.
- f. *Dialog Pakar*, adalah suatu kegiatan yang berupa dialog bersama para pakar dan tokoh-tokoh agama yang berfungsi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para kader.
- g. *Pelatihan Jurnalistik*, merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan karya ilmiah yang berfungsi sebagai pembentuk daya pikir kader.
- h. *Suara Keadilan*, merupakan suatu media bacaan yang di-transformasi-kan kepada para kader guna memperluas wacana tentang sosial kemasyarakatan.
- i. *Dialog Kewanitaan*, merupakan kegiatan yang berupa dialog yang berkaitan dengan kewanitaan. Dialog kewanitaan adalah forum dialog bagi para kader wanita PK-Sejahtera.

#### **E. Struktur Kepengurusan PK-Sejahtera**

Susunan pengurus DPW PK-Sejahtera Riau berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat selaku lembaga eksekutif tingkat pusat yang memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga structural di bawahnya maka terjadilah sebuah kesepakatan tentang susunan pengurus pada DPW PK-Sejahtera Riau, sebagai berikut :

Ketua Umum	: Amin Triaman, S.Si
Wakil Ketua Umum	: Pujo Wismoyo
Sekretaris Umum	: Nurdi, SE. AK
Wakil Sekretaris Umum	: Ir. H. Mansur HS
Bendahara	: Yaniswar, SE. AK
Wakil Bendahara	: Poespo Oetomo, SE
Deputi Pembinaan Kader	: Taufiq Hidayatullah
Deputi Kaderisasi	: H. Hendry Munief, SE. AK
Deputi Kepanduan	: Haryo S. Nugroho
Deputi Kepeloporan Pemuda	: Hendra Kusnadi
Kebijakan Publik dan Organisasi	: Ir. Tyas Indrianto
Deputi Pemuliaan Wanita	: Asih D. Lumintu, S.Pd
Deputi Kajian Wanita	: Susilawati R. Barus, S.Sos
Deputi Pemberdayaan Wanita	: Indria Rita, S.Pd
Deputi Dakwah Meliputi	:
Wilayah Dakwah I	: Hasyim
Wilayah Dakwah II	: Zulherman
Wilayah Dakwah III	: Mukti Sunjaya, S.Pd
Wilayah Dakwah IV	: H. Heru Winarno

### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS ETIKA POLITIK

##### A. Konsep Etika Politik dalam Islam

Dalam memahami pengertian etika politik dalam Islam, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian etika dan pengertian politik Islam. Untuk memahami lebih dalam mengenai etika, perlu pula disinggung secara singkat aliran-aliran pemikiran yang terdapat dalam etika dan politik Islam. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti adat istiadat (*kebiasaan*), perasaan bathin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan.<sup>13</sup>

Menurut M. Amin Abdullah etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, dan etika bisa difungsikan sebagai teori perbuatan baik dan buruk (*ilm al-Akhlaq al-Karimah*).<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara etika adalah ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak gerik pikiran, rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan rasa perasaan sampai menguasai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.<sup>15</sup> Masih banyak lagi para pemikir tentang teori etika seperti ; Ahmad Amin, Soeganda Poerbakawatja, Austin Fogothey, Ahmad

---

<sup>13</sup>M. Abdul Nazer dkk, *Etika dan Moral*, (Bandung: PT. Genta Persada, 2006), Cet. ke-4, Jilid 2, h. 4.

<sup>14</sup>M Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. ke-3, Jilid 1, h. 15

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 16.

Zubair, H. Devos, Asmaran AS, Frans Magnis Suseno dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Secara istilah para ahli berbeda pandangan tentang teori etika. Ada yang mengatakan etika adalah suatu cabang ilmu tentang baik dan buruk, ada pula yang mengatakan etika adalah filsafat nilai susila tentang baik dan buruk dan ada juga yang mengatakan bahwa etika merupakan usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikir kedalam perbuatannya. Tetapi secara nyata para ahli memiliki persamaan tentang teori etika yakni dalam hal implementasi teori yang mencakup baik buruknya perbuatan atau perilaku manusia. Jadi etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan perbuatan manusia yang melingkupi baik dan buruk, serta dapat mempengaruhi perasaan bathin.

Setelah diketahui secara singkat pengertian etika, di sini penulis juga akan membahas secara singkat mengenai pengertian politik Islam. Secara *harfiyah* dalam Islam, politik (*siyasa*) berasal dari kata-kata ; *ساس يسوس سياسة* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Ada juga yang berpendapat bahwa kata politik (*siyasa*) berasal dari kata ; *ساس القوم* yang berarti mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya.<sup>17</sup> Jadi secara *harfiyah* kata *as-siyasa* (politik) berarti ; pemerintah, pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, pengawasan, perekayasaan dan lain-lain.

Secara tersirat, dalam pengertian al-Siyasa, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain ; *pertama*, tujuan yang hendak dicapai melalui proses

---

<sup>16</sup>M. Amin Abdullah, *op. cit.*, h. 8.

<sup>17</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa : Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. ke-1, Jilid 2, h. 40.



pengendalian, dan *kedua*, cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-Siyasah* pun diartikan *والسياسة القيام على شى بما يصلحه* ; yang artinya memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.<sup>18</sup> Jadi yang dimaksud dengan *siyasah* adalah ;

السياسة ما كان فعلا يكون منه الناس اقرب الي الصلاح وابتعد عن الفساد وان لم يكن  
يشعره الرسول ولا نزل به وحي

Artinya : “*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kamafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya”.<sup>19</sup>

Dalam penjelasan lain yang diisyaratkan oleh Ibnu Taymiyah, di dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 58-59 merupakan ayat yang mengandung unsur proses *siyasah*. Firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 58-59 :

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ  
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ  
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ  
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ  
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺗﺎﺩﻳﻨﺎﺕ

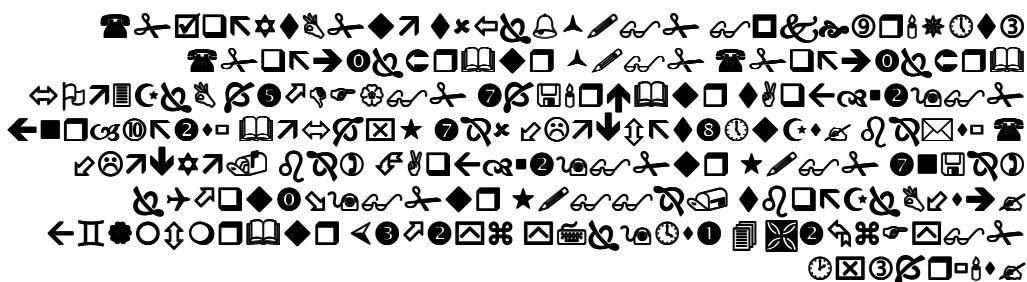
Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan*

---

<sup>18</sup>Ibid. h. 40.  
<sup>19</sup>Ahmad Djazuli, *op.cit*, h.42

*hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”<sup>20</sup>.*

Menurut penulis, surat an-Nisa ayat 58 di atas berkaitan erat dengan aparatur yang menangani permasalahan hukum. Karena pada hakekatnya hukuman tidak akan berjalan jika tidak ada aparatur (pemerintahan) yang melaksanakannya. Allah menyuruh manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan Allah SWT menyuruh manusia untuk menetapkan hukum secara adil. Jadi unsur siyasah yang diisyaratkan oleh Ibn Taymiyah terletak pada proses pelaksanaannya. Pelaksanaan dari surat an-Nisa ayat 58 tidak akan berjalan tanpa adanya pemerintahan. Di sisi lain surat an-Nisa tidak menyebutkan sistem apa yang harus digunakan, dalam artian surat an-Nisa ayat 58 tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pelaksanaannya.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

---

<sup>20</sup>Departemen Agama, *al-Qur’anul Karim dan Terjemah*, (Bandung: Al Ma’arif, 1987) Cet. ke-1, Jilid 1, h. 88.

*kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>21</sup>

Menurut pandangan penulis, unsur dari proses siyasah yang diisyaratkan oleh Ibn Taymiyah terletak pada manusia sebagai unsur rakyat yang harus mentaati pemimpinnya. Adanya pemimpin dan rakyat merupakan perwajahan dari adanya unsur politik itu sendiri. Jadi menurut hemat saya, surat an-Nisa ayat 59 merupakan suatu ayat yang mengandung unsur politik, tetapi tidak menetapkan sistem politik yang harus digunakan.

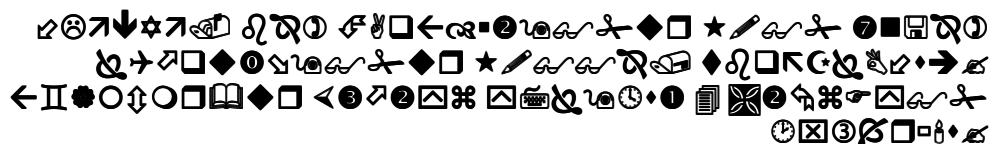
Menurut pendapat ulama, pada ayat pertama (an-Nisa : 58) berkaitan erat dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara adil. Sedangkan pada ayat kedua (an-Nisa : 59) berhubungan dengan rakyat, baik militer ataupun non militer. Jadi dari penjelasan secara singkat tersebut di atas adalah bahwa siyasah/politik mengambil peranan penting dalam membangun kehidupan umat baik dari segi duniawi maupun ukhrowi.

Setelah diketahui penjelasan dari masing-masing kalimat etika dan politik, di sini kembali penulis menjelaskan secara singkat mengenai arti dan teori-teori yang membahas tentang etika dan politik dalam Islam. Secara garis besar etika politik telah disinggung keberadaannya melalui al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59 :

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوِزْنٍ  
كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوِزْنٍ  
كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوِزْنٍ  
كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوِزْنٍ

---

<sup>21</sup>Ibid



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>22</sup>

Dari penggalan kalimat pada surat an-Nisa ayat 59 yang artinya : *kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya*, menekankan pentingnya etika dalam perbedaan pandangan termasuk dalam ruang lingkup “politik/siyasah”. Sehingga serumit apapun permasalahan yang menghasilkan perbedaan haruslah tetap dalam bingkai kerukunan tanpa adanya perpecahan, hal ini dibuktikan dengan penganjuran untuk mengembalikan segala urusan kepada Allah SWT dan RasulNya.

Etika politik merupakan suatu bagian ilmu politik yang bersifat khusus dan memiliki kekhasannya sendiri seperti ilmu-ilmu lainnya. Etika politik merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat teoritis dan juga normatif. dikatakan demikian sebab memang dalam kapasitasnya sebagai ilmu teoritis, etika politik hanya bermain pada bidang-bidang yang menyoal hal-hal yang berkenaan dengan politik dalam bingkai normativisme etika.<sup>23</sup> Jadi yang dimaksud dengan etika politik adalah suatu ilmu yang membahas tentang nilai-nilai, moral dan norma-

<sup>22</sup>Departemen Agama, *op.cit.*

<sup>23</sup>Okky Tirtoadhisoejo, *Etika Politik*, [www.etika-pol.com](http://www.etika-pol.com), h. 3.

norma dalam mengendalikan, mengatur dan menata suatu negara (pemerintahan) dengan tujuan kemaslahatan.<sup>24</sup>

Dikutip dari buku fiqh siyasah, Menurut Abdul Wahhab Khalaf dalam teori Islamnya, etika politik lebih berperan pada bagaimana cara mengelola negara menuju kemaslahatan tanpa dibarengi dengan diskriminasi terhadap golongan-golongan tertentu agar terhindar dari kemudaran. Dengan kata lain mengelola masalah-masalah umum demi kemaslahatan umat dengan menggunakan rambu-rambu syariat yang telah tertuang di dalam al-Qur'an dan hadist dan prinsip-prinsip umumnya baik dilihat dari segi pengaturan kehidupan, perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.<sup>25</sup>

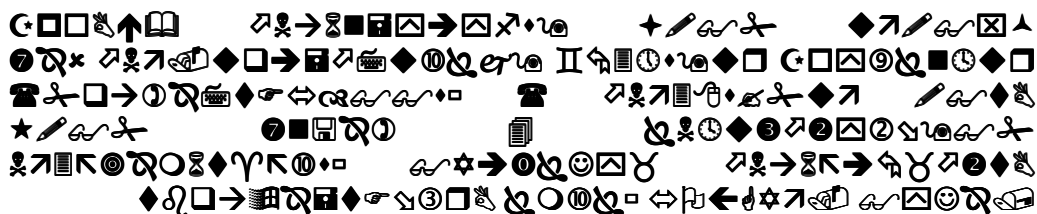
Di samping teori-teori di atas, al-Qur'an telah menawarkan sebuah perspektif modern yang khas tentang etika politik yang merupakan kekuatan yang toleran dan saling menghargai dalam dunia yang multi etnis dan multi komunitas.<sup>26</sup> Firman Allah surat al-Maidah ayat 48 :



<sup>24</sup>Ibid, h. 5.

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 5

<sup>26</sup>John Kelsay dkk, *Etika Politik Islam dalam Civil Society, Pluralisme dan Konflik*, (Jakarta: ICIP, 2005), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 157.



Artinya : ”Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.<sup>27</sup>

Dari ayat di atas, banyak sekali interpretasinya mengenai adanya unsur etika dalam politik. Seperti dikatakan oleh Khalid Mas’ud bahwa dari petikan ayat tersebut di atas mengandung tradisi moralitas Islam, karena penjelasannya meliputi hubungan sesama manusia yang membutuhkan sikap toleransi dan saling harga menghargai.<sup>28</sup> Dalam kajian politik Islam, etika dalam lingkungan sosial adalah etika dalam berpolitik (baca; *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik* karangan Dr. Yusuf al-Qardawi 2007).<sup>29</sup> Hal inilah yang menguatkan

<sup>27</sup>Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2005), Cet. ke-2, Jilid 1, h. 117.

<sup>28</sup>Muhammad Khalid Mas’ud dkk, *Etika Politik Islam*, (Jakarta: ICIP, 2003), Cet. ke-3, Jilid 1, h. 158.

<sup>29</sup>Yusuf al-Qardawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 70.

ketiga ayat di atas mengenai etika politik dalam Islam. Artinya etika politik dalam Islam merupakan kunci pokok dalam pembangunan dan kemashlahatan manusia.

## **B. Perkembangan Etika Politik di Tanah Air**

Membicarakan tentang etika politik di Indonesia, seperti mengumpulkan kepingan-kepingan *puzzle* yang hanya dibaca dalam kondisi utuh. Banyak sekali dinamika, intrik politik, dan strategi-strategi dalam menempuh "perjuangan" menuju "kemashlahatan". Akan tetapi, kita bisa melihat dan merasakan baik dari sudut pandang sejarah maupun secara langsung. Etika politik pada dasarnya merupakan suatu alat di dalam berpolitik untuk memperjuangkan masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan. Dengan etika politik, diharapkan seluruh dinamika dan kejadian di dunia politik berjalan stabil, dinamis dan tanpa kekerasan ataupun diskriminasi.

Islam merupakan agama yang sarat dengan etika, baik etika manusia sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok masyarakat. Sebagai masyarakat mayoritas, seharusnya umat Islam menjadi penentu kebijakan dan agenda perubahan di Indonesia. Di satu sisi, pemimpin negara di Indonesia berasal dari agama Islam. Di sisi lain setiap kebijakan yang muncul tidak menunjukkan adanya etika Islam itu sendiri. Banyaknya kebijakan-kebijakan yang kerap merugikan masyarakat merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, seperti contoh ; pengusuran-pengusuran terhadap pedagang kaki lima, sistem penertiban

terhadap masyarakat yang cenderung menyebabkan cedera fisik, dan lain-lain. Seharusnya umat Islam di Indonesia melahirkan tokoh-tokoh dari rahimnya, yang kharisma dan pesonanya bukan dari hasil rekayasa media, tetapi merupakan tokoh cerminan dari aqidah, akhlaq dan *syakhsiyah mukminah* (kepribadian muslim).<sup>30</sup>

Sedikit penulis menyinggung tentang *khulafaurrasyidin* dan sahabat lainnya. Dalam sejarah Islam, masyarakat berjaya pada masa kepemimpinan Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abu Dzar al-Ghifari dan seterusnya. Mereka lahir dari madrasah Rasulullah SAW. Mereka lahir bukan karena kepentingan dan arogansi, publisitas apalagi hasil rekayasa media, namun mereka datang dengan membawa cinta dan etika Islam.<sup>31</sup> Dengan melihat *realitas* sejarah tersebut, diharapkan dapat menyadarkan umat Islam bahwa kalimat *Laa ilaaha illallah, Muhammadurrasulullah* menghendaki integritas dan moralitas yang solid, yang dibangun atas dasar akidah, akhlaq dan keimanan dalam bingkai *ukhuwwah Islamiyah* yang ikhlas.

Terlepas dari kenyataan di atas, bangsa Indonesia mengalami disintegrasi politik sejak masa orde lama hingga sekarang diakibatkan oleh kurangnya tokoh seperti yang telah disinggung sedikit di atas. Dalam perkembangannya, pada hakekatnya etika politik di Indonesia telah dituangkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa. Pancasila dan undang-

---

<sup>30</sup>Dhuroruddin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 176.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 24.



undang dasar 1945 merupakan cerminan dari nilai-nilai dan moral Islam.<sup>32</sup> Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa hingga detik ini bangsa Indonesia masih mengalami "disintegrasi" tersebut. Jawabnya adalah bangsa Indonesia dalam ruang lingkup elit politik hanya berfokus kepada kepentingan dan kekuasaan belaka.<sup>33</sup>

Pada masa orde lama, permasalahan yang paling mendasar terjadi pada saat menentukan ideologi yang harus ditetapkan bagi bangsa Indonesia. Di sana seringkali terjadi perdebatan-perdebatan sengit antara kubu nasionalis sekuler yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara dan kubu Islam nasionalis yang menginginkan Pancasila dengan bersyariatkan Islam bagi para pemeluknya. Perdebatan tersebut bukan hanya perdebatan yang selesai begitu saja, akan tetapi menjalar hingga sekarang ini. Bukan hanya itu, akibat dari ketidak stabilannya pemerintahan, maka banyak sekali munculnya "pemberontakan" sehingga "perang saudara" pun tidak dapat terelakkan. Dari kondisi yang ada, apakah ideologi yang telah disebutkan di atas tidak mampu membawa bangsa menuju kemaslahatan atau "masyarakat Indonesia" jualah yang tidak mau menuju kemaslahatan atau kurangnya etika bernegara di Indonesia. *Walluhua'lam bishowab.*

Pada masa orde baru, harapan dan optimisme tinggi menyeruak di kalangan banyak pemimpin dan para aktivis politik Islam. Hal ini khususnya tercermin pada para mantan pemimpin Masyumi beserta konstituennya yang

---

<sup>32</sup>M. Kastulani dkk, *Pancasila Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Hukum HAM dan Humaniora La-Qastu Riau, 2004), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 15.

<sup>33</sup>Dhuroruddin Mashad, *op.cit*, h. x.

secara politis tertindas pada masa Demokrasi Terpimpin. Rezim orde baru membebaskan para mantan tokoh Masyumi, termasuk M. Natsir, Kasman Singodimejo, Prawoto Mangkusasmito dan Hamka yang sebelumnya ditawan oleh rezim Orde Lama.<sup>34</sup> Dalam perkembangannya, kembali rezim orde baru memangkas hak politik para aktivis Islam politik dengan menjadikan asas tunggal bagi seluruh partai politik, bahkan membatasi jumlah partai politik. Hal ini tentu bukan saja lemahnya sistem pemerintahan di masa tersebut, akan tetapi lebih cenderung kepada tidak adanya etika politik para elit penguasa pada saat itu.

Hal tersebut di atas merupakan sedikit percontohan betapa peliknya politik di tanah air. Di sisi lain, banyak pandangan masyarakat politik di Indonesia tentang bagaimana cara berpolitik. Kalangan Islam nasionalis mengatakan bahwa untuk melaksanakan agenda politik perlu dibarengi dengan etika politik agar tidak terjadi kembali tragedi-tragedi seperti contoh di atas, tanpa adanya perubahan ideologi politik. Berbeda dengan kalangan Islam fundamental, yang mengatakan kemashlahatan dan etika politik hanya bisa dirasakan dan dilaksanakan jika asas dan Ideologi bangsa menggunakan asas Islam.<sup>35</sup> Dari kedua kalangan tersebut memiliki *ending* dan tujuan yang sama yakni, menuju kemashlahatan umat.

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab, cita-cita sosial Islam (di Indonesia Khususnya) jika dilihat dari perjuangannya, menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika dalam diri dan pemeluknya. Ia dimulai dengan pendidikan

---

<sup>34</sup>Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 96.

<sup>35</sup>Yusuf Wibisono dkk, *op. cit*, h. 103.

kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat yang salah satu cerminannya kesejahteraan lahiriah.<sup>36</sup> Aplikasi pendidikan kejiwaan bagi keluarga dan masyarakat, telah tertuang pada proses pendidikan keagamaan, baik dalam bentuk tradisionalitas (pesantren tradisional) maupun dalam ruang lingkup modern (lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi). Setiap muslim berkewajiban berupaya untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut, termasuk para politikus yang ada di Indonesia.

Pada era reformasi hingga saat ini, berbicara tentang Etika Politik (Haryatmoko 2003), "seperti ber-teriak di padang gurun" yang artinya nonsens. Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk pada apa yang semestinya. Yang ada adalah tujuan menghalalkan segala cara. Dan, yang terlahir adalah tidak adanya politikus jujur, santun, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini terjadi karena lemahnya pengetahuan politik yang bermuatan moral bagi pelaku politik itu sendiri. Dan hingga kini, hampir tidak pernah muncul politikus yang benar-benar menjalankan praksis etika politik yang mencerminkan negarawan yang memiliki keutamaan-keutamaan moral. Maka, tidak mengherankan, persoalan bobroknya moralitas bangsa Indonesia tetap bukan berita surprise, mengingat moralitas yang korup -korupsi jabatan, uang, dan waktu- seakan sudah menjadi *way of life* elite

---

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. ke-15, Jilid 3, h. 242.

politik di Tanah Air dan sudah semacam trade mark, identitas budaya yang sudah sangat melekat. Fenomena seperti ini mencerminkan lemahnya sistem di Indonesia.

Pada saat rakyat terus bermimpi kapan berakhirnya krisis dan supaya beban hidup semakin ringan, kaum elite terus memikirkan kelompoknya sendiri. Ketika rakyat kian menjerit karena naiknya harga-harga barang akibat harga bahan bakar minyak (BBM) naik, para wakil rakyat justru sibuk mengusulkan kenaikan tunjangan. Ketika rakyat, khususnya kaum buruh, menjerit minimnya upah sambil berdemonstrasi di mana-mana, anggota dewan berjalan-jalan sambil berplesiran ke Mesir, menghambur-hamburkan uang negara dengan alasan studi banding yang hanya akal-akalan. Tatkala rakyat berteriak pembasmian korupsi, ternyata di lembaga wakil rakyat, parpol dan kepolisian serta pengadilan yang diharapkan bersih, ternyata menjadi gudangnya korupsi dan sarangnya koruptor (lihat hasil survei Gallub menjelang akhir tahun 2005). Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem politik di Indonesia sangat bobrok dan terpuruk. Bagaimana dualisme semacam itu tetap dibiarkan berjalan bebas seolah tidak pernah mengusik nurani bangsa ini ? Bobroknya moralitas bangsa yang "dipelopori" moralitas elite politik sangat memperkuat tesis klasik EF Schumacher dan Fritjof Capra; krisis ekonomi, sosial politik, dan lingkungan hidup berakar dari krisis moralitas bangsa itu sendiri. Juga adagium politik

melegenda *Lord Action, power tend to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely.*<sup>37</sup>

Dalam perkembangan politik pada era orde lama hingga orde baru, banyak sekali perdebatan-perdebatan sengit yang terjadi antara kaum Islam politik dan kaum sekuler. Hal ini terjadi dikarenakan alasan fundamental dan kesempatan berpolitik. Kaum Islam politik adalah merupakan kelompok yang menginginkan adanya integralitas antara agama dan negara, sementara kaum sekuler merupakan kelompok yang memisahkan antara kepentingan politik (kekuasaan) dan agama. Bagi kaum Islam politik, alasan fundamental sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Karena menurut mereka, hanya dengan asas yang "benar" akan dapat melahirkan kekuasaan yang benar pula. Berbeda dengan kalangan politik sekuler. Perinsip kesempatan berlaku bagi siapa saja (baik masyarakat Islam ataupun non muslim), adalah harga mati dalam menentukan sikap politik. Pada masa tersebut, kalangan Islam selalu termarginalkan, dan aspirasi-aspirasi politik-pun tidak diberdayakan. Sehingga pada masa orde baru, banyak sekali bermunculan "pemberontak" yang menginginkan penegakan syari'at Islam di Indonesia, Seperti DI/TII, Mujahidin dan lain-lain.<sup>38</sup> Pemberontakan terjadi karena ; *pertama*, golongan Islam politik tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan dan menjalankan hak politiknya. *Kedua*, golongan Islam politik beranggapan bahwa "bangsa indonesia" bersama

---

<sup>37</sup>Thomas Korten, *Etika Politik Indonesia*, [www.etika.com](http://www.etika.com).

<sup>38</sup>Arbi Sanit, *Sistem Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-2, Jilid 1, h. 54.

entitas “politik Islam” telah ter-marginal-kan oleh kepentingan politik rezim orde baru.<sup>39</sup> *Lihat suara muhammadiyah no. 9, september 1965.*

Dari sedikit uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa bangsa Indonesia mulai dari masa orde lama hingga sekarang terus mengalami konflik-konflik politik. Semua itu merupakan bentuk dari ambisi kekuasaan dan kepentingan, sehingga dalam perjalannya masyarakat selalu dirugikan dan bahkan menjadi ajang eksperimen elit. Hal ini merupakan wujud dari kurangnya atau bahkan tidak adanya etika politik dalam berpolitik.

### **C. Teori Politik Islam**

Dalam teori politik Islam, banyak sekali karakteristik corak pemikiran Islam. Hal ini mulai berkembang secara luas sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul peristiwa penting yakni pertemuan kelompok Anshar dan Muhajirin yang membicarakan siapa pengganti Nabi di Saqifah yang pada gilirannya menjadi perdebatan sengit di kalangan pemikir politik Islam tentang siapa yang layak menggantikan Nabi dalam kepemimpinan agama dan politik.<sup>40</sup>

Kemudian berbagai peristiwa politik dalam proses penggantian kekuasaan yang diperlihatkan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib menjadi sejarah penting bagi umat Islam. Masing-masing periode tidaklah sama dalam penggantian pemilihan. Abu Bakar dipilih dengan

---

<sup>39</sup>Dhuroruddin Mashad, *op. cit.*, h. 80.

<sup>40</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah dalam Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 26.

cara musyawarah terbatas antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin, Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Siddiq, dan Utsman bin Affan menjadi khalifah berdasarkan musyawarah tim formatur, sedangkan Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah dalam situasi politik yang terpecah-pecah dan hanya dibaiaat oleh sebagian kelompok umat Islam.<sup>41</sup>

Yang paling menegangkan dalam sejarah Islam adalah peristiwa *tahkim* yang terjadi antara Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi puncak perdebatan politik di kalangan umat Islam. Perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah telah melahirkan persoalan theologies yang sangat kuat (kafir dan mengkafirkan). Berikut disebutkan beberapa pemikiran politik Islam yang dijadikan landasan-landasan histories dalam teori politik Islam dalam tiga periode besar :

## **1. Periode Klasik**

Ciri yang menandai perkembangan politik Islam pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas Internasional. Pada periode ini terdapat dua dinasti, yaitu Dinasti Bani Umayyah (661-750 M) dan Dinasti Bani Abbas (750-1258 M). Pada masa Dinasti Umayyah, kajian tentang politik Islam masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijakannya pada

---

<sup>41</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-16, Jilid 1, h. 35-42.

pengembangan wilayah politik kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi, seperti Khawarij dan Syi'ah pada masa ini, namun tidak memiliki pengaruh kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrem dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah.

Pada masa daulat Bani Abbas barulah kajian politik Islam mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh Negara membuat kajian yang dikembangkan oleh ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi pada kalangan ulama Sunni pada umumnya.

Para intelektual yang muncul pada periode ini adalah :

- a. Ibn Abi Rabi' (833-842 M) yang menulis *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan).
- b. Al-Farabi (870-950 M) yang menulis *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Pandangan-pandangan Para Penghuni Negara Utama), *Tahshil al-Sa'adah* (Jalan Mencapai Kebahagiaan), dan *al-Siyasah al-Madaniyah* (Politik Kenegaraan)
- c. Al-Mawardi (975-1059 M) yang menulis tentang *al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-Diniyah* (Peraturan-peraturan Pemerintahan)
- d. Al-Ghazali (1058-1111 M) menulis buku yang berjudul *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama), *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah*



*al-Mulk* (Batangan Logam Mulia tentang Nasihat untuk Raja), *al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (Moderasi dalam Kepercayaan) dan *al-Kimiya-yi Sa'adah*.<sup>42</sup>

Ada beberapa corak yang menonjol dari pemikiran politik Islam di zaman klasik. *Pertama* adanya pengaruh alam pikiran Yunani dalam pandangan berpolitik. Meskipun demikian, teori ini tidak saja diambil secara secular, tetapi mendapat dasar justifikasi dari bangunan konseptual ajaran Islam. Yakni, tujuan Negara adalah tidak semata-mata untuk kebutuhan lahiriah manusia, akan tetapi juga kebutuhan rohaniah dan ukhrawiah. Elaborasi ini oleh al-Farabi dikemukakan dalam konsepnya tentang *al-Sa'adah* (*happiness*) sebagai jalan ruhani dalam kekuasaan dan oleh al-Mawardi dijelaskan bahwa Negara dibentuk untuk melanjutkan misi kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. *Kedua* pemikiran politik yang berkembang lebih berpijak pada kondisi realistik sosial politik.

Ulama Sunni yang dianggap pertama kali menulis kitab tentang siyasah ini adalah Ibn Abi Rabi'. Ia mempersembahkan karangan (karyanya) dengan judul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Pedoman bagi Raja dalam Menjalankan Pemerintahan) kepada Khalifah al-Mu'tashim yang memerintah pada tahun 833-842 M. Sebagai "buku persembahan" tentunya karangannya tidak dapat diharapkan memberi koreksi terhadap penguasa. Ibn Abi Rabi' adalah seorang pengabdikan Negara pada masa itu, karena itu Ibn Abi Rabi' menekankan kepatuhan mutlak kepada khalifah selaku kepala Negara. Meski demikian, Ibn Abi Rabi'

---

<sup>42</sup>Mujar Ibnu Syarif, *op.cit*, h. 30.

mengembangkan pemikirannya dengan mengadopsi beberapa pemikiran politik Yunani. Rabi' mendukung pendapat Plato yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa orang lain. Ini merupakan awal timbulnya kerjasama antara sesama manusia yang pada gilirannya membentuk sebuah Negara.

Pandangan Ibn Abi Rabi', dalam beberapa hal mendapat dukungan dari al-Ghazali (1058-1111 M). Al-Ghazali, dalam bukunya *al-Iqthisad fi al-I'tiqad* menyebutkan bahwa Kepala Negara adalah kudus (suci). Karenanya umat tidak boleh memberontak terhadap kekuasaan. Berbeda dengan mereka al-Mawardi (975-1059 M) masih memungkinkan pemecatan kepala Negara dari jabatannya. Al-Mawardi juga mengemukakan teori "kontrak sosial"<sup>43</sup> antara kepala Negara dan rakyatnya. Karena kepala Negara diangkat melalui kontrak sosial, maka al-Mawardi meniscayakan adanya pemberhentian kepala Negara dari jabatannya.

Sebagai wujud pembelaan mereka terhadap kekuasaan, kalangan ulama Sunni umumnya menetapkan syarat Quraisy untuk menjadi kepala Negara. Ini wajar, karena ketika itu, pucuk pimpinan umat Islam berada ditangan suku Quraisy, disamping adanya ketentuan hadist Nabi yang menyebutkan hal ini. Di antara mereka ada yang secara tegas menyebutkannya, seperti al-Baqillani (w.1013 M), al-Mawardi dan al-Ghazali. Sementara Ibn Abi Rabi' tidak membahasnya karena memang ketika itu Quraisy sedang kuat dan jaya.

---

<sup>43</sup>J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah dalam Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1999, Cet. ke-4, Jilid 1, h. 218.

Berdasarkan kenyataan ini, Harun Nasution menyimpulkan bahwa teori politik Sunni abad klasik ini cenderung memberi legitimasi terhadap kekuasaan. ini wajar, karena pada umumnya tokoh fiqh siyasah pada masa ini berada dilingkar kekuasaan. Sebagai contoh, al-Mawardi sendiri adalah salah seorang pejabat penting dalam pemerintahan Bani ‘Abbas.<sup>44</sup> Agaknya, hanya al-Farabi (870-950 M) yang mempunyai pemikiran berbeda dari tokoh-tokoh di atas. Sebagai filosof, pemikiran politiknya lebih banyak bersifat idealis dan cenderung utopis. Di samping itu perkenalannya dengan pemikiran-pemikiran Yunani Kuno juga memperlihatkan pengaruh tokoh-tokoh filosof Yunani seperti Plato dan Aristoteles dalam pemikiran politiknya. Gagasan politiknya antara lain tertuang dalam karyanya *Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Pandangan Para Penghuni Negara Utama). Pengaruh Plato jelas sekali dalam pandangan al-Farabi ketika ia membagi warga Negara kedalam tiga kelas sosial, yaitu kelas pemimpin, kelas tentara (militer) dan kelas rakyat jelata. Menurutnya, kepala Negara haruslah seorang filosof, karena filosoflah yang dapat membawa manusia ke dalam kebaikan dan hikmah.

Di sisi lain, Syi’ah, Khawarij dan Mu’tazilah juga mengembangkan gagasan politik masing-masing. Syi’ah selalu mempropagandakan pandangan tentang keutamaan Ali dan keluarganya sebagai khalifah serta doktrin kema’suman imam. kemudian, pada masa al-Mu’tamid (869-892 M) berkuasa,

---

<sup>44</sup> M. Iqbal, *op. cit*, h. 22.

mereka mengembangkan doktrin kegaiban imam.<sup>45</sup> Menurut mereka, imam mereka yang kedua belas, Muhammad al-Mahdi, yang ketika itu berumur 5 tahun, menghilang di gua Samarra, Irak pada tahun 873 M.

Meski tampil sebagai oposisi, kaum Syi'ah juga pernah mendirikan kerajaan sendiri yang lepas dari pengaruh Abbasiyah, yaitu Bani Buwaihi di Baghdad dan Daulat Fathimiyah di Mesir. Sedangkan Khawarij, karena sikap ekstrem dan radikal mereka, tidak begitu berpengaruh dalam pentas politik. Pemikiran politik mereka tidak tersusun secara sistematis, namun pemikiran mereka sedikit banyak diadopsi dan dikembangkan secara sistematis oleh Mu'tazilah. Berbeda dengan kalangan Sunni yang menganggap kepemimpinan sebagai kewajiban Syar'i, Mu'tazilah, begitu juga Khawarij, memandang bahwa penegakan institusi imamah hanyalah berdasarkan akal. Karenanya, kepala Negara bukanlah orang yang sempurna dan tidak punya salah seperti pandangan Syi'ah, juga tidak harus dari Quraisy, seperti kelompok Sunni. Siapa saja, menurut Abdul Jabbar, asalkan memiliki kemampuan dan syarat yang cukup dapat menjadi kepala Negara.

#### **a. Teori dan Pemikiran Politik Khawarij**

Golongan Khawarij adalah merupakan sebagian dari pengikut Khalifah Ali ibn Thallib yang keluar dari barisannya dalam perang Shiffin. Kaum Khawarij kemudian mengembangkan paham dan pemikiran di bidang theology dan politik

---

<sup>45</sup>Mujar Ibnu Syarif, *op. cit.*, h. 48, 52, 58.

secara sederhana. Paradigma dan pemikiran mereka di dua bidang ini didasarkan pada peristiwa *tahkim*. Jadi pemikiran mereka sebagai reaksi atas hasil *tahkim* dan perkembangan berikutnya. Pemikiran mereka yang pokok adalah tentang eksistensi khalifah, masalah siapa yang berhak menjadi khalifah dan persyaratannya, masalah mekanisme pengangkatan dan pemakzulan khalifah.

Pembentukan lembaga pemerintahan menurut kaum Khawarij bukanlah merupakan suatu keharusan atau wajib. Hal ini tergantung pada kehendak umat apakah suatu pemerintahan perlu dibentuk atau tidak. Menurut Najdah bin Amr al-Hanafi salah seorang pemuka Khawarij dari sekte al-Najdah berpendapat bahwa imam atau kepala Negara itu tidak perlu sama sekali, dan yang dituntut dari umat untuk mengatur kehidupan mereka adalah kesadaran setiap individu terhadap hak dan kewajiban mereka masing-masing. Jelasnya membentuk pemerintahan menurut Khawarij adalah penyesuaian pada kondisi bukan pada adanya hukum yang mewajibkan.

#### **b. Teori dan Pemikiran Politik Syi'ah**

Perang shiffin diakhiri dengan arbitrase, yang berakibat lahirnya tiga fraksi politik pada waktu itu, yakni Khawarij, golongan Muawiyah yang berhasil membentuk Dinasti Umayyah dan menjadi *imperial* Islam pertama dalam sejarah, dan yang ketiga adalah golongan Ali yang kemudian disebut dengan Syi'ah. Kaum Syi'ah terpecah menjadi beberapa golongan. Dan golongan terbesar yang memiliki pengaruh adalah Syi'ah dua belas (*Syi'ah Istna 'Asyariyah*), Syi'ah

tujuh (*Syi'ah sab'iyah*) yang disebut juga Syi'ah Ismailiyah dan Syi'ah Fatimiyah, dan Syi'ah Zaidiyah. Pertama dan kedua disebut juga dengan *Syi'ah Imamiyah*.<sup>46</sup>

Paradigma pemikiran Syi'ah Imamiyah tentang masalah imamah (kepemimpinan) bukanlah urusan yang bersifat umum yang diserahkan kepada umat, dan menentukan orang untuk memegang jabatan itu menurut kehendak mereka. Sebab masalah imamah termasuk rukun agama dan kaidah Islam. Untuk melegitimasi pemikiran dan keyakinan ini, kaum Syi'ah mengemukakan bukti tekstual dari Nabi yang menetapkan Ali dan keturunannya untuk menjadi imam atau khalifah sebagai pengganti Nabi setelah beliau wafat. *Nash* ucapan Nabi yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

*من كنت مولاه فعلي مولاه : اللهم وال من ولاة وعاد من عاداه*

Artinya : “Barang siapa menganggapku pemimpinnya maka Ali juga adalah pemimpinnya. Ya Allah, jadilah penolong terhadap orang yang mengikutinya, dan jauhilah orang yang memusuhinya.”

*واخذ بيد علي ابن ابي طالب فقال اولست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى يا رسول الله*

*قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه*

Artinya : “Rasulullah keluar pada suatu malam menuju Madinah, kemudian tiba di suatu tempat dekan juhjah, Ghadir Khum, pada malam 18 Zulhijjah. Lalu Dia berpidato dengan memegang tangan Ali Ibn Abi

---

<sup>46</sup>M. Iqbal, *op. cit.*, h. 112.

*Thalib sambil berkata : “Apakah saya tidak lebih utama kepada orang-orang mukmin dari diri mereka, mereka menjawab ‘Ya hai Rasulullah’. Nabi berkata ‘barang siapa menganggapku pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya’.”<sup>47</sup>*

Hadits-hadits tersebutlah yang kemudian menjadi dasar keyakinan kaum Syi’ah bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, telah menetapkan Ali sebagai pengganti beliau. Ali dan penerusnya sebagai imam-imam disamping mewarisi kepemimpinan, juga diyakini oleh pengikut Syi’ah sebagai pewaris sifat kekudusan dari Nabi. Jadi menurut golongan Syi’ah, Imam merupakan sumber hukum dari undang-undang. Karena itu kaum Syi’ah menetapkan bahwa seorang imam haruslah : *Pertama, ma’shum* (terpelihara) dari berbuat salah, lupa dan maksiat. *Kedua*, seorang imam boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut mukjizat untuk mengukuhkan keimamannya sebagaimana mukjizat yang terjadi pada Nabi-nabi Allah. *Ketiga*, seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syari’at. Pengetahuan yang luas itu bukan melalui proses belajar dan ijtihad, tapi merupakan ilmu *laduni*, yaitu kemakrifatan yang dilimpahkan Allah kepada para imam. Dan *Keempat*, imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian agama serta pelestariannya agar terhindar dari penyelewengan.

Berbeda dengan Syi’ah Imamiyah, Syi’ah Zaidiyah tidak menempatkan pemimpinnya pada taraf dan martabat kenabian. Mereka

---

<sup>47</sup>J. Suyuthi Pulungan, *op.cit*, h. 204.

mempersamakan seperti seluruh manusia, namun pemimpin tetap saja berasal dari keturunan Ali dan Fathimah. Dan pemimpin adalah manusia terbaik sesudah Rasulullah. Jadi golongan ini tidak sempat mengkultuskan imam secara berlebihan.

### c. Teori dan Pemikiran Politik Muktazilah

Secara politis penamaan golongan muslim ini merujuk para sahabat seperti Saad bin Abi Waqas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Tsabit dan lain-lain yang mengambil sikap netral terhadap pengangkatan Ali sebagai khalifah keempat. Mereka tidak membaiai Ali dan tidak juga memisahkan diri (*I'tazala*) dari permusuhan antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Artinya mereka memisahkan diri dari kечаh politik praktis yang terjadi di kalangan sahabat.<sup>48</sup>

Pemikiran politik Muktazilah tidak jauh berbeda dengan pemikiran politik Khawarij. Mereka berpendapat bahwa, pembentukan imamah (pemerintahan atau kepemimpinan) tidak wajib berdasarkan syara' melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan muamalah manusia. Oleh karena itu, bagi Muktazilah, urusan imamah (kepemimpinan) diserahkan kepada umat. Mereka berhak memilih orang-orang untuk melaksanakan hukum-

---

<sup>48</sup>J. Suyuthi Pulungan, *loc.cit.*



hukum, dengan catatan beragama Islam, mukmin dan adil. Bagi mereka mendukung atau tidak (memilih pemimpin atau tidak) adalah hak rakyat.<sup>49</sup>

Tentang siapa yang memegang amanah kekhalifahan bagi Muktaizilah bukanlah hak istimewa bagi keluarga tertentu seperti yang terjadi pada golongan Syi'ah. Argument yang dikemukakan oleh Muktaizilah adalah (Q.S. al-Hujarat ayat 13) yang artinya : *“Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling taqwa”*. Petunjuk al-Qur'an ini diperjelas pula oleh sabda Nabi yang artinya : *“Dengarkan dan taatilah walaupun terhadap seorang budak berkulit hitam yang memimpin kamu”*. Teori tentang persamaan hak atas imamah ini, mereka pertegas pula dengan pendapat Umar Ibn khattab yang membenarkan boleh mengangkat seorang *maula* (budak) menjadi khalifah. Umar Ibn Khattab berkata : *“Andaikan Salim, maula Abi Huzaiifah, masih hidup niscaya aku mengangkatnya (memberinya kekuasaan)*. Intinya, perjuangan Muktaizilah lebih bersifat dan menekankan pada gerakan ide dan pemikiran dari pada perjuangan yang bersifat formalisme.

Dari pandangan kelompok-kelompok di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemikiran politik periode ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer

---

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 210.

ilmu asing (Yunani Kuno) ke dalam Islam, gagasan-gagasan politik pada periode klasik juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing.

## **2. Periode Pertengahan**

Periode pertengahan terbagi dalam dua masa, yakni masa kemunduran pertama dan masa tiga kerajaan besar (Usmani di Turki, Safawi di Persia dan Mughal di India). Periode pertengahan di tandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah pada 1259 M di tangan tentara Mongol.<sup>50</sup> Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Kemunduran yang terjadi disebabkan oleh kekuatan-kekuatan politik internal yang menginginkan adanya kekuasaan di bawah dinasti-dinasti kecil yang independent. Hingga akhirnya kenyataan itu terjadi yakni munculnya dinasti-dinasti kecil seperti dinasti buwaihiyah, dinasti thulunyah, dinasti Seljuk dan lain-lain. Di sisi lain, kekuatan eksternal juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemunduran Sunni. Salah satu kekuatan eksternal yang mendominasi pada masa itu adalah bangsa Romawi, Perancis, Armenia dan lain-lain. Pada hakekatnya masih banyak penyebab kemunduran Sunni pada masa itu. Seperti, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan dengan propaganda ajaran manuisme, Zoroaster dan mazdakisme dan ancaman dari luar. Adapun ancaman yang terjadi dari luar

---

<sup>50</sup>M. Iqbal, *op.cit*, h. 23.

pemerintahan pada masa ini adalah perang salib, serangan tentara mongol ke wilayah kekuasaan Islam dan lain-lain.<sup>51</sup>

Karena itu, kecenderungan pemikiran politik Islam juga mengalami perubahan. Jatuhnya dinasti Abbas sebagai dinasti yang banyak memunculkan para pemikir Islam dan banyak melahirkan ilmu pengetahuan, membuat dunia Islam semakin terpuruk. Sementara di luar dunia Islam, ada ancaman dari Negara-negara Barat yang sudah mulai bangkit dari dunia kegelapannya. Dalam kondisi sosial politik yang carut-marut, pemikiran politik Islam menunjukkan kecenderungannya untuk membangkitkan kekuatan Islam. Beberapa intelektual yang muncul adalah : Ibn Taimiyah (1263-1328 M) yang menulis *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Politik Berdasarkan Syari'at bagi Perbaikan Penguasa dan Rakyat), *Majmu' al-Fatawa* (Kompilasi Fatwa-Fatwa) dan *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd al-Syi'ah wa al-Qodariyah* (Metode Kenabian dalam Mengkritik Syi'ah dan Qadariyah). Ibn Taimiyah mewakili kecenderungan terbentuknya pemerintahan yang didasarkan atas hukum Islam (*Siyasah Sar'iyah*), Ibn Khaldun (1332-1406 M) yang menulis *Muqaddimah*. Ibn Khaldun mewakili kecenderungan sosiologis dalam mengemukakan pemikirannya,

---

<sup>51</sup>Badruddin Ali, *Peradaban Islam Klasik*, (Yogyakarta: CV. Grafindo Jaya, 2004), Cet. ke-2, Jilid 1, h. 83-85.

terutama tentang pembahasan teori solidaritas kelompok (*ashabiyah*), Syah Waliyullah al-Dahlawi (1702-1726 M).<sup>52</sup>

Meskipun lahir dari kalangan Sunni dan penganut Mazhab Hanbali, Ibn Taymiyah memiliki pemikiran politik yang sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni abad klasik. Ibn Taymiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban Syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Pengarang buku *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, *Majmu' al-Fatawa* dan *Minhaj al-Sunnah* ini tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala Negara. Ia hanya menegaskan dua syarat untuk menjadi kepala Negara yaitu kejujuran (*al-Amanah*) dan kewibawaan atau kekuatan (*al-Quwwah*). Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus di penuhi. Dengan kedua syarat ini akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syari'at Islam.<sup>53</sup>

Menurut Ibn Khaldun organisasi kemasyarakatan yang dihasilkan manusia memerlukan *wazi'* sebagai pelaksana kekuasaan dalam mengendalikan hawa nafsu kebinatangan, permusuhan dan penganiayaan. Yang terpenting adalah adanya *kedaulatan* dan *mulk* (kekuatan/kekuasaan). Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedaulatan dan kekuasaan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan *'umran* (peradaban dan masyarakat). Suatu Negara tanpa peradaban, sulit dibayangkan bagaimana bentuknya, dan peradaban

---

<sup>52</sup>Mujar Ibn Syarif, *op. cit.*, h. 37-38.

<sup>53</sup>Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 24.

tanpa Negara dan *mulk* adalah tidak mungkin. Karena manusia menurut tabiatnya haruslah saling membantu (*ta'awun*). Hal ini memerlukan *wazi'* sebagai pengendali. Kepemimpinan politik yang didasarkan atas kekuasaan syari'at ataupun kerajaan adalah suatu keharusan. Inilah yang dimaksud dengan *daulat* (Negara).

Jadi organisasi kemasyarakatan sebagai wadah kerjasama antar sesama manusia untuk membangun peradaban, dan pemegang kekuasaan, bagi Ibn Khaldun merupakan unsur dan sendi penting berdirinya Negara.<sup>54</sup> Di sisi lain, sumbangan orisinal Ibn Khaldun kepada pemikiran politik adalah teorinya tentang *ashabiyah* (solidaritas kelompok). Adanya solidaritas kelompok yang kuat inilah menurut Ibn Khaldun yang menjadi prasyarat berdirinya suatu dinasti atau Negara besar. Oleh karenanya, dari berbagai solidaritas kelompok yang terdapat dalam suatu Negara, kepala Negara harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominant.

Sementara Syah Waliyullah al-Dahlawi mengajukan pemikiran yang membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala Negara yang tiran dan zalim. Syah Waliyullah bahkan menegaskan bahwa pemerintahan pada periode pasca kepemimpinan *al-Khulafaurrasyidin* hanya berbeda sedikit dari kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia. Untuk mengembalikan pemerintahan seperti pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin, Syah Waliyullah

---

<sup>54</sup>J. Sayuthi Pulungan, *op. cit*, h. 220.

membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala Negara yang lalim.<sup>55</sup> Pendapat yang paling mencolok menurut Syah Waliyullah adalah tentang sifat manusia yang cenderung pada organisasi sosial dan politik. Gagasan ini jelas ditarik dari pengalaman dunia Islam yang pada dasarnya bersifat naturalistic. Tegasnya, aspek moral, hukum, masyarakat dan Negara harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan sifat dasar manusia. Karena itu Waliyullah merupakan satu-satunya pemikir muslim yang mengungkapkan konsep hukum moral alami sebagaimana kelak membantu pemikiran moral Eropa antara abad ke-13 dan ke-18. Waliyullah al Dahlawi memandang Negara sebagai hasil dari konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat yang kompleks, ketimbang melihatnya sebagai akibat dari interaksi dalam komunitas *hadharah* yang kompleks. Teori Syah Walliyullah tentang Khalifah mencengangkan, karena berusaha memadukan pendekatan sufistik dan ahli *fiqh* dengan cara memilih antara kekhalifahan spiritual yang mengurus perintah-perintah agama dan kekhalifahan politis yang bertugas untuk meningkatkan pelaksanaan ajaran agama.<sup>56</sup>

### 3. Teori dan Pemikiran Politik Kontemporer

Pada periode modern, ditandai dengan kolonialisme yang melanda negeri-negeri muslim. Hampir seluruh dunia Islam berada di bawah

---

<sup>55</sup>M. Iqbal, *op. cit*, h. 26.

<sup>56</sup>Mujar Ibn Syarif, *op. cit*, h. 38.

penjajahan Barat.<sup>57</sup> Dunia Islam tidak mampu bangkit dari kemunduran yang berkepanjangan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran politik Islam pada masa kontemporer. *Pertama*, karena kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. *Kedua*, rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh Negara-negara Barat atas sebagian besar wilayah Islam dan berkembangnya di kalangan umat Islam semangat permusuhan dan sikap anti Barat. *Ketiga*, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi. Kecenderungan seperti itu membuat sebagian pemikir ada yang mencoba meniru Barat, ada juga yang menolak Barat dan menghendaki kembali kepada kemurnian Islam. Dalam periode ini ada tiga kecenderungan teori dan pemikiran politik Islam, yaitu Integralisme, Interseksion (simbiosis) dan Sekularisme.<sup>58</sup>

Kelompok pertama memiliki pandangan bahwa agama dan politik adalah menyatu dan tidak terpisahkan. Dalam pandangan kelompok ini Negara tidak bisa dipisahkan dari agama, karena tugas Negara adalah menegakkan agama sehingga Negara Islam atau Khilafah Islamiyah menjadi cita-cita bersama. Kerena itu, syariat Islam menjadi hukum Negara yang dipraktekkan untuk seluruh umat Islam. Kelompok ini diwakili oleh :

---

<sup>57</sup>M. Iqbal, *loc.cit*

<sup>58</sup>Mujar Ibnu Syarif, *loc. cit.*

Jamaluddin al-Afghani (1839-1897 M) di kenal sebagai Pembaharu Politik Islam abad ke 19, Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M)<sup>59</sup> yang menulis *al-Khilafah wa al-Imamah al-Ushma* (Kekhalifahan atau kepemimpinan Agung) dan tafsir *al-Manar*, Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman al-Banna atau yang lebih dikenal dengan nama Hasan al-Banna (1906-1949 M) merupakan seorang pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin, Abu al-A'la al-Maududi (1903-1979 M) yang menulis *al-Khilafah wal Mulk* (Khalifah dan Kerajaan) dan *Islamic Law and Constitution*. Ia juga salah satu dari pendiri Jama'at Islami di Pakistan, Sayyid Quthb (1906-1966 M) seorang ideology gerakan Ikhwanul Muslimin yang menulis tentang *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan sosial dalam Islam) dan *Ma'alim al-Thariq* (Petunjuk Islam),<sup>60</sup> Imam Khomeini (1900-1989 M) adalah seorang Pemimpin Revolusi Islam Iran 1979 dan penggagas konsep *Wilayatul Faqih* yang menulis *Hukumat-i Islami* (Sistem Pemerintahan Islam).<sup>61</sup> Dari sejumlah pemikir yang memiliki pandangan Integralistik ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dengan Negara yang ditunjukkan oleh mereka dalam aktivitas politiknya dalam bentuk partai politik Islam yang bertujuan untuk merebut Negara dari penguasa secular.

Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua ini memiliki pandangan bahwa agama dan politik melakukan simbiosis atau hubungan

---

<sup>59</sup>J. Suyuti Pulungan, *op. cit.*, h. 280.

<sup>60</sup>M. Iqbal, *op. cit.*, h. 29.

<sup>61</sup>Mujar Ibnu Syarif, *op. cit.*, h. 40.



timbang balik yang saling memerlukan. Agama membutuhkan Negara untuk menegakkan aturan-aturan syari'at Islam, sementara agama membutuhkan Negara untuk mendapatkan legitimasi. Para pemikir ini menunjukkan garis pemikiran politik moderat dan tidak mengabaikan pentingnya Negara terhadap agama. Kelompok ini diwakili oleh : Muhammad Abduh (1849-1905 M) tokoh pembaharu Mesir,<sup>62</sup> Muhammad Iqbal (1873-1939 M) bapak pendiri Negara Pakistan,<sup>63</sup> Muhammad Husain Haikal (1888-1945 M) yang menulis *Hayatul Muhammad* (Sejarah Hidup Muhammad), *Fi Manzil al-Wahyi* (Kedudukan Wahyu) dan *al-Humumat al-Islamiyat* (Pemerintahan Islam), dan Fazlur Rahman (1919-1945 M) bapak pembaharu Pakistan yang menulis *Islam, Islam and Modernity*, dan *Major Themes of The Qur'an*.

Sedangkan kelompok ketiga memiliki pandangan bahwa agama harus dipisahkan dengan Negara, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan untuk mendirikan Negara. Terbentuknya Negara dalam masa awal Islam hanya faktor alamiah dan histories dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak perlu umat Islam mendirikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah. Kelompok ini diwakili oleh : Ali Abd al-Raziq (1888-1966 M) yang menulis *al-Islam wa Ushul al-Hukm : Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukmah fi al-Islam* (Islam dan Pemerintahan : Kajian tentang Khilafah dan

---

<sup>62</sup>J. Suyuti Pulungan, *loc.cit.*

<sup>63</sup>M. Iqbal, *loc.cit.*

Pemerintahan dalam Islam),<sup>64</sup> Thaha Husein (1889-1973 M) yang menulis tentang *Mustaqbal al-Tsaqafah fi Mishr* (Masa Depan Kebudayaan Mesir)<sup>65</sup> Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938 M) pendiri Republik Turki Modern.<sup>66</sup>

#### **D. Argumentasi Perlunya Etika dalam Berpolitik**

Piagam Madinah berisi 52 pasal atau seksi yang merupakan teks konstitusi tertulis pertama di dunia yang paling lengkap dan orisinil, dibandingkan dengan berbagai jenis aturan dan pengaturan mengenai tata cara berpolitik dengan etika yang baik pada zamannya. Piagam ini juga memposisikan dunia Islam jauh mendahului dunia Barat dalam meletakkan prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan, kemerdekaan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Piagam Madinah secara eksplisit merupakan etika berpolitik di negara Madinah. Pada masa *Khulafaurrasyidin* terdapat pula naskah-naskah yang mengandung etika berpolitik, misalnya surat-surat Ali bin Abi Thalib kepada Gubernur Mesir dan Gubernur Basrah yang mengandung nasehat dan pandangan Imam Ali tentang akhlak seorang pemimpin.<sup>67</sup>

Adapun hubungan antara piagam madinah dengan Islam sebagai ideologi PKS adalah merupakan satu kesatuan rangkaian kehidupan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang saling berhubungan satu sama

---

<sup>64</sup>J. Suyuthi Pulungan, *op. cit*, h. 304.

<sup>65</sup>M. Iqbal, *op. cit*, h. 29.

<sup>66</sup>Mujar Ibnu Syarif, *op. cit*, h. 42.

<sup>67</sup>Susilawati, Deputi Kewanitaan, *wawancara*, Pekanbaru 11 September 2009.

lain. Dengan tidak dituangkannya sistem kontrak sosial dan politik dalam al-Qur'an dan hadits, piagam madinah merupakan satu contoh kontrak sosial politik yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma Islam itu sendiri.<sup>68</sup>

Sukses dalam kehidupan di lingkungan sosial masyarakat sekaligus manusia sebagai *zone politichon* adalah di saat manusia di zaman modern seperti sekarang ini kembali kepada nilai-nilai modern di zaman klasik seperti piagam madinah di atas.<sup>69</sup> Contoh dari ketidak suksesannya bangsa Indonesia saat ini dalam kehidupan sosial adalah bangsa indonesia selalu dirundung permasalahan khususnya di dunia politik. Konflik-konflik politik tidak dapat terelakkan lagi. Bahkan konflik-konflik yang terjadi di dunia politik di Indonesia khususnya, merebak sampai ke lingkungan masyarakat bisaa. Hal ini terjadi karena perilaku elit politik yang penuh dengan paradox dan ambisi kekuasaan, sehingga masyarakat sipil menjadi embas dari “keganasan politik”<sup>70</sup>.

Pemeriksaan argumentasi PK-Sejahtera dalam pengaplikasian etika dalam berpolitik, dapat dirumuskan dengan melibatkan konstruksi theologi politik komunitas dakwah ini dalam melihat realisasi antara Islam dan Negara. Menurut PK-Sejahtera, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi tidak mungkin menolak dari tanggung jawabnya melaksanakan misi khalifah, yaitu memelihara, mengatur dan memakmurkan bumi yang merupakan aktivitas politik yang otentik. Pengakuan terhadap eksistensi misi kekhalfahan, melestarikan dan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>Dokumen DPW PK-Sejahtera, *loc. cit.*

<sup>70</sup>*Analisis Penulis.*



Bagi PK-Sejahtera ayat di atas merupakan suatu refleksi bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Kalimat *فإن من الدين التمسك بالدين الإسلامي* diartikan bahwa masuk kedalam agama Islam harus secara totalitas, karena ketotalitasan dalam menjalankan ajaran Islam merupakan kunci keberhasilan. Kalimat *al-Silmi Kaffah* diartikan bahwa agama Islam telah menyediakan formula kehidupan yang sangat sempurna dan serba lengkap, termasuk permasalahan politik. Sehingga kalimat *fisilmi kaffah* diartikan bahwa proses politik merupakan bagian dari kelengkapan agama Islam.<sup>72</sup>

Konsekuensinya adalah, PK-Sejahtera bersama harus berpegang teguh dengan ajaran Islam, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Nilai-nilai etika dan moral dalam Islam sangatlah sempurna. Maka dari itu, sebagai makhluk yang pada dasarnya memiliki perasaan bathiniah, mari kita kembalikan ruh-ruh Islam ke dalam jati diri dan kehidupan kita.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Analisis Penulis terhadap penafsiran ayat oleh PK-Sejahtera.

<sup>73</sup>Bush Hamidi, Aktivis PK-Sejahtera wilayah Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru 20 September 2009.

**BAB IV**  
**PERANSERTA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**  
**DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK**  
**MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**A. Etika Politik Partai Keadilan Sejahtera**

Secara komprehensif, berbagai kalangan meyakini bahwa fenomena belakangan ini dilatarbelakangi oleh kemerosotan moral atau etika berpolitik. Sebagai partai yang berasaskan Islam, sudah seharusnya dan merupakan kewajiban bahwa al-Qur'an dan Sunnah Nabi menjadi pedoman sekaligus sebagai falsafah dasar perjuangan. Hal ini dibenarkan oleh Ir. Tyas Indriarto yang mengatakan bahwa : "Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai Islam dalam menjalankan tindakan politiknya selalu mengedepankan moral dan etika Islami sehingga target pencapaian politik selalu dominan tanpa adanya cheos dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah".<sup>145</sup> Islam adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh urusan kehidupan manusia yang terdiri dari individu, keluarga, sosial masyarakat, bernegara dan segala aktivitas yang meliputinya seperti ekonomi, politik, pendidikan, hukum dan lain-lain. Di sisi lain dalam menjalankan roda politik, PK-Sejahtera selalu menekankan kepada para kader dan simpatisan untuk selalu menggunakan al-Qur'an dan Sunnah dalam

---

<sup>145</sup>Tyas Indriarto, Kabid Kebijakan Publik dan Organisasi, *wawancara*, Pekanbaru 21 Agustus 2009.

segala hal. Konsep ini merupakan sebuah prinsip bahwa, berpolitik menurut PK-Sejahtera adalah ibadah.<sup>146</sup>

Sudah seyogyanya di saat partai berbasis Islam ini mengeluarkan slogan kampanye, akan dijalankan sesuai dengan aturan dan rambu-rambu Islam, karena tidak terlepas dari kenyataan bahwa “Bersih, Peduli dan Profesional” bukan hanya semata-mata slogan, akan tetapi kristalisasi bukti-bukti di lapangan sejak partai ini berdiri pada tahun 1998. “Bersih, Peduli dan Profesional” dapat dengan mudah diatribusikan kepada PK-Sejahtera karena memang nilai-nilai itu berkaitan dengan etika politik yang dapat dilihat langsung dan dirasakan oleh masyarakat. Sampai kadar tertentu “Bersih, Peduli dan Profesional” telah menjadi *brand image* sekaligus *specific knowledge* PK-Sejahtera. *Brand Image* terkait dengan pencitraan diri, sementara *specific knowledge* terkait dengan penciptaan nilai dan penyebaran manfaat. Tanpa adanya implementasi yang sesuai dengan etika semua itu tidak akan pernah tercapai terutama pada konsep kemaslahatan umat.<sup>147</sup>

Sementara etika politik menurut PK-Sejahtera adalah merupakan perbuatan dalam politik yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat membangun, tidak merusak tatanan sosial budaya dan tidak pula bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan tetap berlandaskan kepada al-Qur’an dan Hadits.

---

<sup>146</sup>DPW Partai Keadilan Sejahtera, *Dasar Partai Keadilan*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2004), Cet. ke-2, Jilid 1, h. 27.

<sup>147</sup>Majelis Pertimbangan Pusat PK-Sejahtera, *Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta : DPP PK-Sejahtera 2008, Cet. ke-1, Jilid 1, h. 56.





Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>150</sup>

Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya serta kepada para “pemimpin”. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasulullah SAW (hadist). Politik adalah suatu hal yang sangat rentan dengan perbedaan.<sup>151</sup>

Penciptaan nilai dan penyebaran manfaat merupakan orisinalitas (jati diri), sementara citra merupakan buah cermin dari orisinalitas. Citra tidak dapat diciptakan dengan kemasan dan pemasaran semata tanpa diiringi dengan moral manusianya. Mustahil rasanya sebuah pencitraan tidak dibarengi dengan moral yang baik, contohnya ; jika ada aturan dilarang korupsi, maka kita (PKS) adalah partai politik anti korupsi dan selalu berusaha menegakkan aturan tersebut.<sup>152</sup>

Bersih cermin kesalehan personal (moral/etika), sementara peduli cermin kesalehan sosial (moral/etika politik). Untuk dapat memimpin bangsa dibutuhkan kesalehan profesional. Slogan PK-Sejahtera menjelang pemilu 2009 adalah “Bersih, Peduli dan Profesional”. Pemaknaan profesional adalah dimilikinya kompetensi inti, kecakapan manajerial, kemampuan berfikir strategis dan sikap

---

<sup>150</sup>Departemen Agama, *op.cit*, h. 88

<sup>151</sup>*Analisis Penulis*.

<sup>152</sup>Suroyo, Sekretaris DPW PK-Sejahtera Riau, wawancara, Pekanbaru 24 September 2009.

terbuka (*open minded*) tanpa tipuan politik dan berjalan apa adanya. Semua itu adalah cerminan dari etika politik PK-Sejahtera.

Di sisi lain, PK-Sejahtera sebagai entitas politik, secara subyektif berjuang dengan dasar aqidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil sejahtera dan bermartabat. Bersamaan dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional. Islam secara eksternal adalah bentuk *diferensiasi* dan *positioning* PK-Sejahtera sebagai entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PK-Sejahtera berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal-subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemashlahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlaq terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai amal shalih dan mencerminkan etika Islam.<sup>153</sup>

## **B. Peranserta Partai Keadilan Sejahtera dalam Membangun Etika Politik**

Partai Keadilan Sejahtera yang terdapat di dalam AD/ART di ungkapkan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa PK-Sejahtera merupakan partai yang berasaskan Islam.<sup>154</sup> Sebagai partai yang berasaskan Islam, maka PK-Sejahtera menegaskan bahwa, cara beretika dalam dunia politik pun harus mencerminkan

---

<sup>153</sup>Amin Triawan, Ketua Umum PK-Sejahtera, *wawancara*, Pekanbaru 20 Juli 2009.

<sup>154</sup>DPP PK-Sejahtera, *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PK-Sejahtera*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Tuna, 2002), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 26.

kehidupan Islam sehari-hari. Tidak saling menjatuhkan dan tidak pula saling satu sama lain, baik itu internal partai ataupun dengan lain partai. Namun, prinsip “benar katakan benar” adalah harga mati dalam berpolitik.<sup>155</sup>

Menurut Hidayat Nurwahid, dalam berpolitik harus menunjukkan budaya politik yang santun yang berakar kepada nilai Islam yang hak, karena hal itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Parpol harus menunjukkan budaya yang santun dalam berpolitik, Jangan main gontok-gontokkan hanya untuk memenangkan kepentingannya saja. Budaya santun harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga etika dan moral bermasyarakat dapat terus terpelihara. Ia mengingatkan, parpol untuk tidak menjadikan budaya santun itu sebagai jargon politik semata untuk mengumbar janji, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perilaku, cara kerja serta pola hidup setiap hari. Jangan hanya saat menjelang Pemilu atau Pilkada, parpol atau para kandidat berkampanye ingin memperjuangkan nasib rakyat, tetapi setelah memperoleh kekuasaan lalu melupakan janji-janjinya, maka tidak akan melahirkan budaya santun.<sup>156</sup> Hal tersebut dibenarkan oleh Nurdin, SE, AK, sambil mengatakan bahwa, cara-cara seperti itulah (yang dikatakan Hidayat Nurwahid) yang selalu dikembangkan dan didistribusikan baik kepada para kader PK-Sejahtera ataupun kepada masyarakat terutama para simpatisan PKS. Hingga detik ini, PK-Sejahtera

---

<sup>155</sup>Mustiyono, Tokoh Masyarakat sekaligus kader PK-Sejahtera, Pekanbaru, wawancara Pekanbaru 5 September 2009.

<sup>156</sup>Hidayat Nurwahid, *Etika Politik*, [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com)

tidak pernah dalam bermasyarakat ataupun berpolitik menggunakan sifat arogansial dan ego-ego sehingga mengesampingkan budaya dan etika politik. Setidaknya ini bagian dari pembelajaran dalam sopan santun berpolitik. Karena sangat penting rasanya bersosialisasi dalam masyarakat dengan sopan santun dan ramah tamah, tidak asal-asalan sehingga menyinggung perasaan orang lain.<sup>157</sup>

Menanggapi permasalahan etika dalam berpolitik, PK-Sejahtera memandang Nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk sosial terletak dalam keanggotaannya dalam masyarakat dan diukur sejauh mana ia memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat. Dengan mengerahkan seluruh potensinya manusia berusaha keras mewujudkan kontribusi dalam semua bidang seperti, keagamaan dan etika politik, budaya dan pendidikan, ekonomi dan lain-lain yang diarahkan oleh prinsip-prinsip moral yang bersumber dari kitab suci. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian membentuk etika pribadi dan sosial politik yaitu berupa petunjuk moral untuk membimbing perilaku individu dan kelompok menjadi manusia-manusia yang memiliki integritas moral yang tinggi.

Islam merupakan agama yang paling teguh memperjuangkan prinsip-prinsip persamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maka sudah selayaknya rasa cinta sesama manusia menjadi target perjuangan yang terimplementasi melalui berbagai macam kegiatan seperti diskusi-diskusi, seminar yang berkaitan dan bersentuhan langsung dengan dimensi “cinta”. Hal ini menjadi

---

<sup>157</sup>Nurdin, Sekretaris Umum, *wawancara*, Pekanbaru 25 September 2009.

salah satu falsafah dasar PK-Sejahtera dan juga merupakan himbauan langsung dari Nabi Muhammad SAW :

ليؤمن احدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه

Artinya : “*Kalian tidak beriman sampai mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk diri sendiri*” (HR. al-Bukhari).<sup>158</sup>

الناس كاسنان المشط

Artinya : “*Manusia itu sama seperti gigi sisir*” (HR. al-Qudha’i).<sup>159</sup>

Prinsip persamaan dalam Islam dipandang sebagai nilai moral yang tercantum dalam syari’at dan mempunyai pengaruh nyata pada kedudukan individu dan masyarakat. Ia adalah tiang pancang struktur sosial Islam. Demi terwujudnya keadilan sosial, etika dan nilai-nilai keislaman serta kesederajatan kemanusiaan harus ditegakkan dalam setiap dimensi hubungan antar sesama manusia. Maka dari itu, etika Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan, apa lagi menyangkut urusan politik. Kaitannya di atas terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم

Artinya : “*Orang mukmin itu sejajar nilai darah mereka dan mereka satu kekuatan dalam menghadapi kekuatan luar dari mereka. Orang yang terlemah pun menjaga dzimmah (perlindungan) mereka*” (HR. Abu Dawud).<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup>Hadits Bukhari yang Dikutip dari MPP PK-Sejahtera, *Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: MPP PK-Sejahtera, 2008), Cet. ke-3, Jilid 1, h. 470.

<sup>159</sup>*Ibid*, h. 471

<sup>160</sup>Sunan Abu Daud, Jus 12 h 119 no. 3927.

Analisis hadits di atas adalah menyangkut urusan atau hubungan antar sesama manusia. Islam mewajibkan setiap orang beriman untuk bersama-sama merealisasikan keadilan yang menyeluruh dalam segenap tata hubungan antar sesama manusia. Hadits tersebut mengatakan bahwa “orang mukmin itu sejajar nilai darah mereka dan mereka satu kekuatan dalam menghadapi kekuatan luar dari mereka. Orang yang terlemah pun menjaga dzimah mereka”. Dari pernyataan ini terdapat hubungan yang sangat kuat, yang menjadi solidaritas antar sesama muslim untuk saling membantu dan menolong. Dari solidaritas tersebut terdapat etika dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Dalam ranah sosial terdapat kehidupan berpolitik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial sangat erat dengan kehidupan atau urusan politik.<sup>161</sup>

Secara teoritis membangun institusi-institusi yang beretika dan adil dapat dimulai dengan kematangan konsep, optimalisasi nilai-nilai (etika), keadilan dan persamaan serta penerapan keadilan prosedural dan konsisten. Membina individu politik dengan dasar Islam adalah sebuah keharusan.<sup>162</sup> Islam menentang tindakan semena-mena yang merugikan orang lain sehingga melukai fisik ataupun psikisnya. Setiap muslim harus berupaya menjauhkan diri dari berbuat kerusakan yang berdampak kerugian atas diri sendiri dan orang lain. Cara yang paling tepat dalam merumuskan etika politik adalah dengan cara memantapkan Ideologi politiknya.

---

<sup>161</sup>*Analisis Penulis.*

<sup>162</sup>MPP PK-Sejahtera, *op.cit*, h. 471.

Islam sebagai *manhaj al-Hayah* memiliki pemikiran, ide, gagasan dan pandangan yang jelas dan rasional tentang Tuhan, manusia, alam dan konsepsi serta solusi terhadap semua permasalahan kehidupan. Bukan hanya itu, Islam juga memiliki metoda penyebaran dan sosialisasinya keseluruh dunia serta mempertahankan dan memperjuangkannya. Corak politik suatu bangsa pada umumnya ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Ideologi tersebut melahirkan sejumlah nilai-nilai etika dan moral yang memastikan perjalanan politik tidak keluar dari koridor-koridor ideologinya. Logikanya politik harus sarat dengan dimensi moral dan etika yang berakar pada ajaran, konsep-konsep dan ideologinya. Dengan demikian dalam politik, moralitas dapat dikategorikan sebagai atribut ontologis yang menegaskan hakikat ideologi politik suatu bangsa atau umat. Maka politik yang tercerabut dari akar moral ideologi sama dengan mendegradasi politik itu sendiri, sebab hakikat politik sesungguhnya mengandung keutamaan-keutamaan moral seperti kejujuran, kebijaksanaan, keadilan dan kebenaran, pelayanan, mementingkan orang banyak daripada pribadi dan kelompoknya, pengabdian dan sebagainya. Setiap tindakan politik PK-Sejahtera harus menampilkan dimensi-dimensi tersebut.<sup>163</sup>

Secara umum, penerapan etika politik PK-Sejahtera terefleksi dalam jati dirinya sebagai partai dakwah. Dakwah yang membimbing manusia mengenal tuhanNya dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia yang membawa solusi bagi pemasalahan yang dihadapinya. Dakwah menuju

---

<sup>163</sup>MPP PK-Sejahtera, *op. cit* h. 484.

persaudaraan yang adil di kalangan umat manusia, jauh dari bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras atau entitas adalah perwujudan dari etika politik. Selain itu, sekaligus menjadi karakteristik yang membentuk etika politik dan perilaku aktivitas dalam berpolitik.

Penerapan etika politik bagi solusi bangsa yang terefleksi dalam kebijakan Partai Keadilan Sejahtera diantaranya adalah :

1. *Al-Ishlah* (Reformatif)

Setiap gerakan dan langkah yang ditempuh PK-Sejahtera selalu berorientasi pada perbaikan (*ishlah*), baik yang berkaitan dengan individu, masyarakat ataupun yang berkaitan dengan pemerintah dan negara. Salah satu contoh *ishlah* (perbaikan) atau reformatif yang berkaitan dengan individu dan masyarakat adalah menerapkan konsep management qalbu yang sarat dengan etika dan moral manusia.

Dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya dan menegakkan daulah-Nya, PK-Sejahtera secara tegas menyikapi tingkah laku wakil rakyat yang duduk di DPR yang mudah disuap. Kasus suap menyuap yang terjadi di kalangan wakil rakyat (baca ; DPR), merupakan bentuk dari lemahnya pemerintahan terhadap sistem yang dibangunnya. Di sisi lain, kurangnya "materi etika" yang ada pada pelaku suap menyuap tersebut. PK-Sejahtera sebagai partai dakwah menunjukkan bahwa kader-kadernya anti suap dan membongkar beberapa kasus penyuapan yang terjadi di DPR. Ini adalah suatu contoh solusi bernegara yang sangat reformatif dan



memerlukan etika dalam berpolitik. Hal ini dibenarkan oleh Zulherman yang mengatakan :

“Kader-kader PK-Sejahtera telah berhasil mengungkap kasus penyuaipan anggota DPR yang terjadi di Kampar dan beberapa daerah lain serta membanwanya ke Pengadilan. Ini merupakan bukti komitmen PK-Sejahtera”.<sup>164</sup>

## 2. *Al-'Alamiyah*

Pada hakekatnya etika politik yang ada pada PK-Sejahtera bersifat *alamiyah*, sejalan dengan sifat manusia yang cenderung saling menghargai satu sama lain, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan asas PK-Sejahtera itu sendiri. Oleh sebab itu perinsip kebijakan dakwah PK-Sejahtera tidak terlepas dari kebijakan dan gerakan dakwah sedunia. Setiap langkah yang ditempuh oleh PK-Sejahtera harus selaras dengan *akhlaq al-Karimah*. Artinya segala yang terjadi pada tataran baik itu sosial, budaya ataupun politik selalu dijalankan dengan akhlaq yang terpuji sebagaimana tertuang dalam literatur Islam.<sup>165</sup>

Salah satu contoh dari bagian dakwah yang dilaksanakan oleh kader-kader PK-Sejahtera Provinsi Riau adalah pelaksanaan aksi (demonstrasi) mendukung RUU tentang pornografi dan pornoaksi yang dilaksanakan di depan kantor DPRD Provinsi Riau pada tanggal 20 maret 2006, dan

---

<sup>164</sup>Zulherman, Wilayah Dakwah II, *wawancara*, Pekanbaru 26 September 2009.

<sup>165</sup>Dokumen DPW PK-Sejahtera 2007.

mengadakan seminar tentang bahaya narkoba terhadap remaja yang diadakan di hotel pangeran. Hal ini dimaksudkan dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>166</sup>

3. *Al-Mustaqabliyah* (orientasi masa depan)

Sebuah orientasi masa depan bagi bangsa, PK-Sejahtera menerapkan prinsip berpolitik orientasi masa depan guna membangun insan adil, sejahtera dan bermartabat. Sebuah contoh keinginan PK-Sejahtera menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut syari'at Islam meskipun hal ini tidak dinyatakan terang-terangan dalam setiap kampanye politik, apalagi menggunakan jalur ekstreme yang tidak sesuai dengan prilaku budaya politik di Indonesia.

4. *Al-Awlawiyat wa al-Mashlahah* (Skala prioritas dan prioritas kemanfaatan)

Prinsip *al-Awlawiyat* pada hakikatnya terefleksi dari budaya berfikir strategis. Efektifitas gerakan moral salah satunya ditentukan oleh kemampuan dalam menentukan skala prioritas, langkah dan kebijakannya. Oleh sebab operasionalnya didasarkan pada visi-misi yang tepat guna menunjang kemajuan bangsa yang lebih baik. Di samping itu PK-Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Pada hakikatnya mashlahah umat menjadi dasar utama. Kebutuhan umat menjadi skala prioritas PK-Sejahtera.

---

<sup>166</sup>Khairul, Wilayah V, *wawancara*, Pekanbaru 12 Oktober 2009.

5. *Al-Hulu* (solusi)

Jika anggota dewan selalu berpoya-poya dan ter-nina bobokkan dengan kepentingan-kepentingan individu (pribadi) yang bertendensi langsung pada bagi-bagi kue (dana segar) atau pembengkakan pasilitas anggota dewan, bagai mana jadinya rakyat yang sedang dilanda “krisis” besar-besaran. Kasus seperti ini menunjukkan etika yang buruk bagi wakil rakyat kepada rakyatnya. Di mana letak etika bernegara bagi pribadi politik seperti ini. Dalam hal ini, pengurus PK-Sejahtera menjawab “sebagai solusi terhadap pembengkakan dana operasional anggota dewan yang berlebihan adalah PK-Sejahtera menolak fasilitas mobil mewah yang diberikan oleh pemerintah yang dirasa terlalu berlebihan”.<sup>167</sup>

6. *Al-Nuwwuw wa al-Tathawwur* (tumbuh dan berkembang)

Konsistensi dalam pembangunan sudah menjadi watak PK-Sejahtera tidak boleh melahirkan *stagnasi*, karena ini merupakan wujud dari kepentingan seluruh umat. Sebuah dorongan yang tumbuh dan berkembang lahir atas dasar kaidah yang bersumber dari nilai Islam. Prinsip pertumbuhan yang bersifat veritikal dan perkembangan yang bersifat horizontal harus menjadi prinsip gerkan yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasional partai harus tetap konsisten pada pembangunan potensi sumber daya manusia.

---

<sup>167</sup>Suroyo, Sekretaris PK-Sejahtera, *wawancara*, Pekanbaru 27 September 2009.

Dalam hal ini PK-Sejahtera menciptakan inovasi baru untuk mensosialisasikan syari'at Islam misalnya dalam bentuk halaqah-halaqah keislaman dalam skala kecil (akar rumput) di samping skala besar seperti seminar-seminar tentang pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari serta saling cinta-mencintai sesama manusia ciptaan Allah SWT, penyuluhan dan lain-lain.

7. *Al-Istiqamah* (konsisten)

Berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam merupakan ciri orang muslim. Maka konsistensinya kepada manhaj Islami harus menjadi inspirasi gerakannya. Dalam hal ini, peletakan etika dalam berpolitik ada pada ke-konsistensiannya terhadap segala aturan. Terutama terhadap aturan-aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konsekwensinya setiap kebijakan, langkah-langkah dan program kerja partai harus *istiqomah* (taat asas) pada hukum trasenden yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiyah. Proses sejarah (*ayat kauniyah*), kitab-Nya (*ayat qauliyah*), sunnah rasulullah SAW, serta elaborasi tertulis pada mujtahid.

8. *Al-Wasath* (moderat)

Masyarakat muslim di sebut sebagai masyarakat “tengah” (*ummatan wasathan*). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap dan watak moderat dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. *Al-Wasath* yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek *nazhariyah* (teoritis) dalam *amaliyah* (operasional) atau aspek *tarbiyah*

(pendidikan) dan *tashawwur* (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlaq, adab dan dalam semua kebijakan program, perilaku dan etika politik PK-Sejahtera. Sikap ini dinyatakan dalam bentuk penolakan terhadap ekstimisme dan terorisme yang terjadi dewasa ini di Indonesia umumnya. Hal ini dibenarkan oleh responden yang menyatakan bahwa : “PK-Sejahtera menolak segala bentuk kekerasan dan teror yang melibatkan masyarakat sipil sehingga menimbulkan sentimen dari agama lain dan menganggap Islam adalah agama yang keras (*radikal*). Sesungguhnya Islam adalah agama *rahmatan lil’alamin*.<sup>168</sup>

#### 9. *Al-Syar’iyah* (konstitusional)

Secara etimologi syari’at berarti jalan menuju tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau jalan tempat mengalirnya air sungai. Dalam hal ini, agama yang ditetapkan Allah SWT untuk manusia disebut syari’at, dalam arti *lughawi*, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupannya di dunia. Kesamaan syari’at Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syari’ah ia akan mengalir dan bersih jiwanya.<sup>169</sup>

Dikutip dari *fiqh siyasah* karangan Dr. M. Iqbal, M.Ag, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa syari’at adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk hamba-Nya agar diikuti dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Sementara

---

<sup>168</sup>Hasyim, Wilayah Dakwah I, *wawancara*, Pekanbaru 27 September 2009

<sup>169</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 1.

Farouq Abu Zaid merumuskan syari'at sebagai peraturan Allah SWT yang disampaikan melalui nabi-Nya yang tidak dapat diubah atau diganti.<sup>170</sup>

Syari'at telah menetapkan hubungan pokok antara manusia dengan Allah (*hablu min Allah*) dan hubungan antar sesama manusia (*hablu min al-annas*). Menjunjung tinggi syari'at, ketundukan dan komitmen kepadanya dalam setiap aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim bagi konsekwensi keimanannya. Komitmen itu terwujud dalam bentuk keteguhan kepada *al-Haq*, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus. Semua peraturan yang ada dalam kitab suci menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku (etika) politik. Salah satu contoh kecil pada PK-Sejahtera dalam melaksanakan aturan syari'at adalah mewajibkan kader-kadernya -khususnya akhwat (kaum wanita)- untuk mengenakan pakaian yang menutupi aurat dan tidak bergaul dengan lelaki selain mukhrimnya secara bebas. Hal ini membentuk etika muslim baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial ataupun dalam kehidupan sebagai insan politik. Hal ini dibenarkan oleh Khairul yang mengatkan bahwa, menyangkut persoalan etika dalam berpolitik, syari'at Islam menjadi kunci dasar bagi umat Islam khususnya dan bagi seluruh umat pada umumnya.<sup>171</sup>

Mengenai peranserta PK-Sejahtera dalam membangun etika politik secara umum terefleksi dalam kebijakannya :

---

<sup>170</sup>M. Iqbal, *op. cit*, h. 2.

<sup>171</sup>Khairul, Wilayah Dakwah V, *wawancara*, Pekanbaru 17 September 2009.

### 1. Kebijakan Ideologi Partai

Diprediksi tingkat kesadaran politik masyarakat akan terus menguat, oleh karena itu perlu ditetapkan kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik politik di kalangan aktivis partai. Tindakan yang sangat diperlukan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan tersebut adalah :<sup>172</sup>

- a. Proyeksikan Islam sebagai ideologi umat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.
- b. Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan pembebasan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah, pembebasan manusia dari kefakiran ideologi yang menghantarkan manusia kepada perasaan bahagia dan ketenangan hidup.
- c. Menjadikan syari'at yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits sebagai otoritas sistem yang berjalan sesuai dengan setiap zaman dan tempat.

### 2. Politik

Yang sangat diperlukan dalam politik guna melahirkan etika berpolitik adalah ; *Pertama*, pembangunan sistem, dengan cara memperjuangkan syari'at Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan bagi para pemeluknya. *Kedua*, pembangunan komunikasi politik yang dilakukan dengan tujuan kemashlahatan sehingga memerlukan kerangka dasar. Adapun kerangka dasar tersebut adalah ; kesadaran umum pentingnya sistem politik

---

<sup>172</sup>Dokumen DPW PK-Sejahtera Riau 2005.

Islami sebagai solusi persoalan negara. *Ketiga*, membangun budaya politik dengan cara mengokohkan Islam sebagai sumber etika dan moral politik, mengembangkan budaya egaliter dan demokrasi yang tercermin dalam perilaku politik, mengembangkan budaya rasionalitas dalam kehidupan berpolitik. *Keempat*, pembangunan sikap cinta, *ta'awun* dan loyal serta membudayakan sikap *husnuzon* (berbaik sangka) dan menciptakan suasana yang kondusif demi terciptanya kerjasama, *ukhuwwah Islamiyah* dan persatuan dan kesatuan bangsa.

### 3. Birokrasi

Setidak-tidaknya ada tiga fenomena yang muncul dalam kehidupan birokrasi sekarang ini yaitu : kebobrokan di semua sektor, menjadi sarang KKN dan tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka PK-Sejahtera memandang perlu dilakukan reformasi guna *clean government*, dengan cara : *Pertama*, membentuk wadah independen secara khusus bagi pegawai yang bekerja di pemerintahan. *Kedua*, kaderisasi publik guna sebagai pelopor dalam pemberantasan KKN dan dalam menegakkan kejujuran, keadilan, kesederhanaan dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. *Ketiga*, melakukan kontrol secara aktif.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup>Dokumen DPW PK-Sejahtera Riau 2008.



### C. Tinjauan Fiqh Siyasah

Etika politik dalam Islam telah tergambar pada masa Nabi Muhammad SAW, dengan prinsip yang tertuang dalam piagam madinah seperti yang telah dituliskan di atas. Hubungan kemanusiaan dan kenegaraan pada masa itu telah diberikan teladannya oleh Rasulullah SAW sendiri setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari nama yang dipilih Nabi bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencana Nabi dalam mengemban misi suci Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas politik yang beretika dan berakhlak terpuji. Yang paling menakjubkan dari semuanya tentang Konstitusi Madinah ialah bahwa dokumen itu memuat, untuk pertama kalinya dalam sejarah, prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal manusia.<sup>174</sup> Piagam madinah yang di dalamnya memuat berbagai aspek kehidupan termasuk nilai etika dan moral, merupakan kontrak Rasulullah bersama komunitas Madinah, yang berbeda-beda suku dan agama untuk membangun Madinah dan pluralitas. Tidak lain, Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dinaungi dalam perjanjian bersama.<sup>175</sup>

Dalam piagam madinah terdapat 47 (empat puluh tujuh) aturan atau perjanjian antara Rasulullah yang mewakili kaum muslimin dengan masyarakat madinah pada umumnya. Saling harga menghargai dan taat terhadap aturan

---

<sup>174</sup>Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. x.

<sup>175</sup>Mujar Ibn Syarif, *op. cit.*, h. 26.

hukum (syari'at) merupakan isi dan ketetapan dari piagam madinah. Hal ini berkaitan erat dengan permasalahan etika. Karena pada hakekatnya hormat menghormati, harga menghargai dan mentaati segala bentuk peraturan merupakan cermin dari kepribadian yang baik pada diri manusia. Bagi umat Islam diwajibkan untuk selalu taat terhadap segala bentuk aturan Islam (syari'at). Sementara bagi kaum non muslim pada masa itu diberikan kebebasan untuk menjalankan dan mentaati segala aturan yang dimiliki dalam agamanya. Kenyataan ini merupakan bentuk egalitarian kepemimpinan Rasulullah pada saat itu. Tidak adanya tekanan dan paksaan bagi umat pada saat itu merupakan corak dari isi perjanjian yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan bagi seluruh umat dalam menjalankan kehidupan dan beragama di masa itu. Tentunya kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dengan tidak mengesampingkan segala bentuk peraturan dan kesepakatan bersama kaum madinah.<sup>176</sup>

Sementara hubungan piagam madinah dengan perilaku politik PK- Sejahtera pada saat ini merupakan usaha-usaha dan tindakan yang mengarah kepada tuntutan syari'at Islam untuk dijadikan sebagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam itu sendiri. Karena pada hakekatnya piagam madinah merupakan manifestasi dari syari'at Islam. Diharapkan hal ini dapat menjadi sebuah kenyataan pada bangsa Indonesia, yakni menerapkan system

---

<sup>176</sup>*Analisis Penulis Yang Merujuk Pada Sumber Piagam Madinah Yang Dikutip dari ; Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1991), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 320-323.*

syari'at Islam bagi para pemeluknya. Di sisi lain PK-Sejahtera sangat menghormati kehadiran umat non muslim di Indonesia, yang merupakan bagian dari tanggungjawab umat Islam terhadap non muslim untuk melindunginya jika umat non muslim tersebut tergolong *kafir dzimmi*. Tentunya dengan tidak merusak tatanan keagamaan bagi mereka (non muslim).<sup>177</sup>

Di sisi lain, perwujudan etika politik yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddik adalah, pada peristiwa di Saqifah Bani Sa'adah sebelum Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Pada saat terjadinya perdebatan alot di tubuh kaum Anshar tentang siapa pengganti Nabi setelah beliau wafat, tiba-tiba datanglah Abu Bakar, Umar Ibn Khattab dan Abu 'Ubaidah sehingga perdebatan alot tersebut berhenti seketika. Sebenarnya Umar ingin berbicara lebih dahulu kepada kaum Anshar, namun Abu Bakar mencegahnya. Ia khawatir, kalau-kalau watak Umar yang keras menimbulkan gejolak di kalangan Anshar dan terjadi perpecahan di tubuh umat Islam. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar pada waktu itu adalah sangat tepat, dan bersentuhan langsung dengan etika politik yang pada dasarnya dirasakan oleh kaum Anshar dengan pembuktian adanya ketenangan dalam suasana yang begitu alot dan panas.<sup>178</sup>

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar Asididq menggantikan Nabi sebagai penerus dalam hal melanjutkan pelaksanaan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nilai-nilai etika dalam berpolitik yang

---

<sup>177</sup>MPP PK-Sejahtera, *op. cit*, h. 309.

<sup>178</sup>M. Iqbal, *op. cit*, h. 45.

dapat diambil dari kepemimpinan Abu Bakar Siddiq adalah pada saat beliau berpidato dalam pelantikannya. Beliau menyampaikan “pidato kenegaraan” yang berisi tentang kisi-kisi etika dalam kehidupan berpolitik dan bernegara.<sup>179</sup> Isi dari pidato tersebut adalah :

*“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Kalau aku menjalankan tugasku dengan baik, bantulah aku. Sebaliknya jika aku salah, luruskanlah langkahku. Orang yang lemah di antara kamu adalah kuat dalam pandanganku, sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang kuat diantara kalian aku anggap lemah setelah haknya aku ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi selama aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, gugurlah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanlah shalat, Allah akan memberikanmu rahmat”*.<sup>180</sup>

Pidato pelantikan ini memperlihatkan garis kebijakan yang menunjukkan moral dan etika yang Islami yang ditempuh oleh Abu Bakar sebagai nahkoda baru bahtera Negara Madinah. Tindakan dan perilaku itu begitu modern dan “terlalu maju” untuk kondisi dunia pada masanya. Hal-hal penting yang dapat dicatat dari pidato tersebut adalah : *Pertama*, pelantikan Abu Bakar dapat dikatakan sebagai wujud kontrak sosial antara pemimpin dengan rakyatnya. *Kedua*, tekad Abu Bakar untuk menegakkan HAM dengan melindungi orang-orang lemah terhadap kesewenangan orang-orang yang kuat. *Ketiga*, seruan untuk membela Negara (jihad) pada saat yang dibutuhkan. *Keempat*, perintah untuk tetap menjalankan

---

<sup>179</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet. ke-1, Jilid 1, h. 30.

<sup>180</sup>*Ibid*

shalat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat.<sup>181</sup>

Adapun hal-hal yang termuat dalam pidato Abu Bakar pada waktu itu adalah :

1. Pengakuan Abu Bakar Siddiq bahwa Ia adalah “orang kebanyakan” dan mengharap agar rakyat membantunya jika ia berbuat benar dan meluruskannya pada saat berbuat salah (keliru).
2. Seruan agar semua pihak menepati etika atau akhlaq kejujuran sebagai amanah, dan jangan melakukan kecurangan (khianat).
3. Penegasan atas prinsip persamaan manusia (egaliterianisme) dan keadilan sosial.
4. Seruan untuk memelihara semangat perjuangan, yaitu sikap hidup penuh cita-cita luhur dan melihat jauh ke depan.
5. Penegasan bahwa kewenangan kekuasaan yang diperolehnya menuntut ketaatan rakyat tidak karena pertimbangan partikulasi pribadi pimpinan, tetapi karena nilai-nilai universal prinsip yang dianut dan dilaksanakannya.<sup>182</sup>

Pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab, inti dari etika politik dapat dilihat dari pidato pelantikan Umar yang berbunyi :

*“Aku telah dipilih menjadi khalifah. Kerendahan hati Abu Bakar sejalan dengan jiwanya yang terbaik diantara kalian serta juga lebih mampu memikul urusan-urusan kamu yang penting. Aku diangkat menjadi Khalifah tidak sama dengan beliau. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih kuat untuk memikul jabatan ini*

---

<sup>181</sup>M. Iqbal, *loc. cit.*

<sup>182</sup>M. Iqbal, *ibid*, h. x.

*dari padaku, maka aku lebih suka memilih memberikan leherku untuk dipenggal dari pada memikul jabatan ini”*.<sup>183</sup>

Selanjutnya pidato yang dibawakan oleh Khalifah Ustman Ibn Affan pada masanya, yang berbunyi :

*“Sesungguhnya kalian hidup di negeri yang fana dan berada dalam pemerintahan yang tidak kekal. Karena itu segeralah berbuat baik sekuat mampumu untuk menyongsong batas kehidupanmu. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Janganlah kalian terseret olehnya. Janganlah tipu daya itu melalaikan kalian dari Allah. Ambillah pelajaran dari masa lampau, kemudian bersungguh-sungguhlah dan jangan kalian lalai. Sesungguhnya Allah tidak pernah lengah terhadap kalian. Adakah orang-orang yang tinggal dan menikmati kehidupan dunia ini yang kekal abadi ? jauhkanlah dunia ini sebagaimana diperintahkan-Nya. Raihlah kebahagiaan di akhirat. (kemudian Ustman mengutip ayat al-Qur’an surat al-Kahfi, 18:45 yang mengumpamakan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Dengan air tersebut ditumbuhkan-Nyalah tumbuh-tumbuhan. Setelah itu tumbuhan tersebut kering ditiup angin”*. Kemudian nilai etika politik juga dapat diambil pemaknaannya dari pidato Khalifah Ali Ibn Thalib yang mengatakan bahwa : *“Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla telah menurunkan al-Qur’an sebagai petunjuk yang menjelaskan yang baik dan yang buruk. Ikutilah kebaikan dan jauhilah kejahatan. Kalau engkau menjalankan kewajiban yang telah digariskan-Nya, maka kelak engkau akan masuk surga. Allah mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan-Nya dan memuliakan kehormatan manusia dan sangat menekankan keikhlasan serta tauhid Islam. Orang Islam harus memberi kesejahteraan bagi manusia lainnya dengan perkataan dan perbuatannya. Karenanya, janganlah kamu menyakiti orang lain. Segeralah melaksanakan kepentingan sosial”*.<sup>184</sup>

Dari keempat pidato di atas, seluruh pidato yang dibawakan oleh Khulafaurrasyidin mengandung pemaknaan dan implementasi etika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan politik. Di dalam pelaksanaan politik, keempat Khulafaurrasyid selalu berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan, dan berusaha untuk tidak menyinggung atau menyakiti rakyatnya walaupun

---

<sup>183</sup>*Ibid*, h. 55.

<sup>184</sup>*Op.cit*, h. 58

sebesar gram sekalipun. Landasan nilai dan moralitas Islam selalu dijunjung tinggi dengan harapan keridhaan Allah semata.

Beranjak dari pidato-pidato di atas dan perjalanan umat Islam disepanjang sejarah, menurut pandangan Taymiyyah, legitimasi moral lah yang ia anggap layak diterapkan mengingat itu menguntungkan ummat. Ini tercermin dalam pernyataan beliau yang dikutip Qamaruddin Khan : "kesejahteraan ummat tidak dapat terwujud melainkan dalam sebuah tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung. Dan oleh karenanya masyarakat membutuhkan seorang untuk mengatur mereka". Dari pernyataan ini jelas bahwa yang menjadi titik tekan bagi Taymiyyah adalah problem sosial, ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial harus ada dan karenanya pemikirannya lebih cenderung pada legitimasi etis moral kekuasaan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.<sup>185</sup>

Menurut Prof. H. A. Djazuli, MA, pembentukan suatu umat dimulai dari pembentukan pribadi-pribadi yang berkualitas, memiliki keyakinan yang kokoh dan berakhlak mulia, serta penyerahan diri total kepada kehendak Allah seperti tergambar dalam sejarah Nabi pada periode Mekah. Dengan singkatnya, pribadi-pribadi pembentuk umat adalah pribadi-pribadi *muthma'inah*.<sup>186</sup>

Dalam interaksi antara umat yang berbeda agama, muslim menjalin *ukhuwah insaniyah* secara moral yang diwujudkan dalam *ta'awun insani* dalam menghadapi berbagai masalah bersama atas dasar persamaan kemanusiaan.

---

<sup>185</sup>Okky Tirtoadhisoerjo, *Etika Politik Ibnu Taymiyah*, www.pcpm-tebettimur.com.

<sup>186</sup>Ahmad Djazuli, *loc. cit*, h. 400.

Dengan cara ini, rujukan tempat kembalinya adalah kesejajaran manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di muka bumi. Dalam hal ini terlihat perwujudan etika yang tercermin dalam Piagam Madinah yang dapat disimpulkan :

1. Sekalipun dari banyak suku, muslim merupakan satu komunitas keumatan yang kuat.
2. Hubungan muslim dan non muslim : (a) bertetangga baik, (b) saling membantu menghadapi musuh bersama, (c) membela yang teraniaya, (d) saling menghormati agama dan (e) saling menasehati.
3. Mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan pemutus setiap perselisihan.
4. Keadilan dan persamaan dihadapan hukum serta perlindungan terhadap rakyat dilaksanakan. Dalam tahapan ini, diharapkan terwujud adalah *balдах thayyibah*.<sup>187</sup>

Kemudian hubungan kasih sayang (*rahmah*). Hal ini tidak hanya berdasarkan moral dan etika, tetapi juga melandasi hubungan dengan alam semesta, baik nabati maupun hewani, mendasari hubungan moral semua makhluk Allah di muka bumi sesuai misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Selain itu sesuai hadits Nabi, “*Sayangi semua yang ada di muka bumi, Allah akan memberi rahmat kepadamu*”. Dengan

---

<sup>187</sup>*Ibid*, h. 401.



demikian, akan terwujud kehidupan *marhamah* di antara semua makhluk di muka bumi.<sup>188</sup>

Sementara itu, al-Ghazali sebagai mana para pemikir muslim yang lain dan tidak seperti pemikir Eropa, punya kekhasan dalam pemikiran politiknya. Yaitu pemikiran politik yang bersendikan agama dan etika (moral). Menurutnya, kedudukan politik setingkat di bawah kenabian. Corak pemikiran yang demikian terdapat dalam buku karangannya *al-Tibr al-Masbuk fi nashihat al-Mulk* yang khusus membicarakan etika para penguasa, dan buku-buku lainnya seperti *Surat-surat al-Ghazali (letters of al-Ghazali)* yang dihimpun oleh Abdul Qayyum. Surat-surat tersebut ia tujukan kepada para sultan, gubernur, pejabat pemerintahan, para penindas, penguasa yang tidak simpatik, petugas yang korup, para politisi, negarawan dan orang lain yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan. Dalam surat-surat tersebut, menurut Abdul Qayyum terpantulkan suatu realisasi diri yang paripurna dari salah seorang pembaharu yang sangat mengesankan di zamannya, yang menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang tidak bermoral.

Menurut al-Ghazali, manusia yang terjerumus dalam kejahatan karena disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, syahwat yang menyesatkan seseorang ke arah kegiatan-kegiatan yang tidak sehat dan tidak bermoral. *Kedua*, amarah yang menghasut seseorang untuk membunuh. *Ketiga*, keserakahan yang mendorong seseorang untuk tidak jujur dan korupsi.

---

<sup>188</sup>*Op.cit*, h. 403.

Oleh karena itu, kata al-Ghazali adalah suatu keharusan bagi para penguasa memahami tugas dan tanggung jawabnya, membersihkan aparat pemerintahannya dari segala sifat-sifat tercela, tidak takabur, menyadari dirinya adalah bagian dari rakyat. Aparat pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan dengan tidak melihat siapa yang akan dilayani, tapi apa dan bagaimana kebutuhannya. Mereka jangan membisaakan diri dengan bergelimangan kemewahan materi dan nafsu. Yang terpenting lagi mereka harus membina hubungan baik dan cinta kasih dengan rakyat, sikap dan tindakannya tidak bertentangan dengan syari'at, tidak membuat kebijaksanaan yang menimbulkan kebencian rakyat dan menyumbangkan hartanya untuk membantu rakyat yang taraf kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Kepedulian sosial seperti yang telah di paparkan dan diamalkan oleh al-Ghazali, perlu dicontoh oleh kaum ulama atau ilmuwan, intelektual dan cendekiawan.

Dalam rangka itu pula, antara golongan tersebut dan penguasa perlu menjalin kerjasama yang baik. Sebab mereka kaya dengan pengetahuan mengenai persoalan-persoalan Negara dan kemasyarakatan. Sedangkan penguasa langsung mengatur urusan Negara dan kepentingan rakyat. Artinya kedua belah pihak harus berpihak kepada golongan lemah dalam rangka menunaikan amanah dan keadilan.

Amanah dan keadilan sangat dominant dalam pemikiran politik Ibn Taymiyah yang berdasarkan pada agama dan moralitas. Pemikiran politiknya sangat kuat relevansinya dengan syari'at dan etika. Orientasi pemikiran politiknya



membawa manusia menuju kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Segala perbuatan dan tindakan Rasulullah SAW merupakan bukti nyata yang wajib diikuti dan ditiru bagi seluruh umatnya.<sup>191</sup>

Al-Ghazali juga menggambarkan adanya para Nabi seperti Ibrahim, Ismail dan Idris yang diterangkan dalam al-Qur' an sebagai orang-orang yang selalu menjaga etika dan kejujuran (kebenaran). Dengan demikian, sebagai insan sosial sekaligus insan politik cita-cita kemaslahatan bagi seluruh umat adalah sebuah keharusan dan keinginan bersama. Sehingga dengan mengutamakan etika dalam berpolitik juga merupakan sebuah keharusan, karena itu adalah fitrah manusia sebagai ciptaan-Nya, dan sekaligus sebagai khalifah yang diberikan amanah dalam makmurkan bumi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal 'alamin. *Wallahua ' lam bishawab.*

---

<sup>191</sup>Analisis Penulis terhadap surat al-Ahzab ayat 21.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana etika politik PK-Sejahtera dan peranannya dalam membangun etika politik serta tinjauan fiqh siyasahnya, yaitu sebagai berikut :

1. Etika politik menurut PK-Sejahtera merupakan etika dan moralitas Islam yang senantiasa dibutuhkan dalam mengarungi kehidupan di dunia menuju kehidupan hakiki, yakni kehidupan di akhirat kelak. Dengan kata lain, etika politik menurut PK-Sejahtera merupakan perbuatan dalam politik yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat membangun, tidak merusak tatanan sosial budaya dan tidak pula bertentangan dengan al-Qur' an dan al-Hadits. Dengan demikian menurut PK-Sejahtera, etika politik yang digunakan adalah perilaku *akhlaqul karimah* yang dimaksud dalam Islam.
2. Peranserta PK-Sejahtera dalam membangun etika politik dituangkan dalam pengembangan dakwah Islam. Bersama entitas politik lainnya, PK-Sejahtera menawarkan Islam sebagai fundamental manusia sekaligus melayakkan Islam sebagai basis ideologi (*mindset*) dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian menurut PK-Sejahtera, berpolitik dengan menggunakan Islam sebagai landasan organisasi dan menjadikan dakwah sebagai program

dasar partai adalah bentuk peranan PK-Sejahtera dalam membangun etika politik.

3. PK-Sejahtera sebagai salah satu partai politik di Indonesia yang berasaskan Islam, menegaskan eksistensinya sebagai media dakwah. Bagi PK-Sejahtera berpolitik dengan menggunakan metode dakwah adalah merupakan salah satu bentuk dari menegakkan *amar ma' ruf nahi munkar*. Membangun etika politik menurut PK-Sejahtera adalah bagian dari menegakkan *amar ma' ruf nahi munkar*. Dalam tinjauan fiqh siyasah, metode membangun etika politik dalam menegakkan *amar ma' ruf nahi munkar* yang dilaksanakan oleh PK-Sejahtera, tidak keluar dari koridornya. Prinsip *siyasah syar' iyah* yang tergantung dalam usaha dan upaya yang dilakukan oleh PK-Sejahtera daerah Riau adalah prinsip menegakkan *amar ma' ruf*, sedangkan peran melaksanakan *nahi munkar* adalah tugas umum yang harus dilaksanakan setiap umat Islam.

## **B. Saran-saran**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa, penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik isi ataupun materi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kekurangan penulis. Saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Selanjutnya penulis sampaikan saran kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai-partai lain, bahwasannya :

1. Aplikasi etika politik sebaiknya bukan hanya diterapkan dalam ruang lingkup golongan saja (partai politik tertentu), akan tetapi diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Di dalam pelaksanaan dan penerapan etika politik, jangan sekali-kali mencari sensasi golongan atau kepentingan-kepentingan politik semata. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya *setback* paradigma politik yang buruk seperti pada masa orde baru.
2. Menjadikan etika dan budaya (kultur) yang ada di Indonesia sebagai salah satu acuan dalam berpolitik ataupun bermasyarakat.
3. Hendaklah aktivis dan para kader partai tidak terjebak pada simbol-simbol Islam yang hanya kulit dari ajaran Islam. Tentunya yang menjadi harapan bersama adalah menguatamakan substansi dari kandungan ajaran Islam itu sendiri.

Demikianlah kesimpulan dan saran dari penulis. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi kita, terutama dalam hal etika berpolitik. *Wallahua ' lam bis showab*

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah dalam Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. ke-1, Jilid 2.
- Arbit Sanit, *Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-2, Jilid 1.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-16, Jilid 1.
- Badruddin Ali, *Peradaban Islam Klasik*, (Yogyakarta: CV. Grafindo Jaya, 2004), Cet. ke-2, Jilid 1.
- Burhanuddin Salam, *Etika Individual*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), Cet. ke-1, Jilid 2.
- Departemen Agama, *al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987) Cet. ke-1, Jilid 1.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), Cet. ke-2, Jilid 1.
- Dhuroruddin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Inonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. ke-1, Jilid 1.
- DPD Partai Keadilan Sejahtera Surakarta, *Kurikulum Tarbiyah*, (Surakarta: Auliya Press Solo, 2004), Cet. ke-2, Jilid 1.
- DPW PK-Sejahtera, *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PK-Sejahtera*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Tuna, 2002), Cet. ke-1, Jilid 1.
- Fahmi Asy-Syannawi, *Fiqh Politik dalam Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet. ke-1, Jilid 1.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), Cet. ke-1, Jilid 1.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah dalam Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. ke-4, Jilid 1.
- Majelis Pertimbangan Pusat PK-Sejahtera, *Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: DPP PK-Sejahtera, 2008), Cet. ke-1, Jilid 1.
- Meriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. ke-3, Jilid 1.
- Misbahush Sudur, *NU dan Civil Society di Indonesia*, (Pekanbaru: LPNU, 2005), Cet. ke-1, Jilid 1.
- M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik Partai Keadilan Sejahtera*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2008), Cet. ke-1, Jilid 1.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. ke-1, Jilid 1.



M. Kastulani, dkk, *Pancasil Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Pusat Kajian Hukum HAM dan Humaniora La-Qastu Riau, 2004), Cet. ke-1, Jilid 1.

Muhammad Khalid Mas'ud dkk, *Etika Politik Islam*, (Jakarta: ICIP, 2005), Cet. ke-3, Jilid 1.

Muhammad Lukman Edy, *Reformulasi Gerakan PKB, Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Iskandarsyah Institute, 2006), Cet. ke-1, Jilid 1.

M Yatimin Abdullah, *Pengantar Study Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. ke-1, Jilid 1.

Moehammad Thobroni, *Majalah Transformasi Demokratik edisi ke-tujuh, catatan Islam Progresif Transformatif*, (Yogyakarta: PMII, 2005), Cet. ke-1, Jilid 1.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. ke-15, Jilid 3.

Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah dalam Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), Cet. ke-1, Jilid 1.

Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. ke-1, Jilid 1.

Nur Mahmudi Ismail, Jati Diri Keadilan, lihat dalam Sahar L Hassan, *Memilih Partai Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Cet. ke-1, Jilid 1.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999), Cet. ke-1, Jilid 1.

Sahar Hassan dkk, *Memilih Partai Islam (visi, misi dan persepsi)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. ke-1, Jilid 1.

Salim Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-3, Jilid 1.

Subkhinul Ja'far, S.Hi, dalam Sripsinya ; *Penerapan Asas Islam dalam Partai Politik di Era Reformasi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2006)

Suhud Alynudin, Supto Waluyo dkk, *Partai Keadilan Sejahtera Menjawab*, (Jakarta: Pustaka Saksi, 2004), Cet. ke-1, Jilid 1.

Syarafuddin Al-Musawi, *Dialog Sunnah-Syi'ah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), Cet. ke-1, Jilid 1.

TB. Ronny Rahman Nitibaskara dkk, *Menuju Kearifan Bernegara*, (Jakarta: PB PMII, 2005), Cet. ke-1, Jilid 1.

TB. Ronny Rahman Nitibaskara dkk, *Kejahatan dalam Analisa Kriminologi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), Cet. ke-1, Jilid 1.

Yusuf Al-Qardawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. ke-1, Jilid 1.

Yusuf Wibisono dkk, *Islam Mulai Akar Kedaunnnya*, (Bogor: BKIM IPB Press, 2003), Cet. ke-2, Jilid 1.

Zulfan Heri dan Dahnil Syah, *Pendidikan Politik Kewargaan*, (Pekanbaru: ISDP, 2000), Cet. ke-1, Jilid 1.